

381.34
HAM
P C 1



YBd : BKP NO 18 AS
+ EMAS

19/30

**PELAKSANAAN KONTRAK ALIH TEKNOLOGI ANTARA
PERUSAHAAN ASING DAN PERUSAHAAN NASIONAL
DALAM RANGKA MELINDUNGI KONSUMEN**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

EMY HANDAYANI, SH
NIM. B4A 099 049

Pembimbing :

Prof. Dr. Hj. Esmi Warassih Pujirahayu, SH.MS

**BIDANG KAJIAN HUKUM EKONOMI DAN TEKNOLOGI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2001**

UTP-PUSTAK-UNDIP

**PELAKSANAAN KONTRAK ALIH TEKNOLOGI
ANTARA PERUSAHAAN ASING DAN PERUSAHAAN NASIONAL
DALAM RANGKA MELINDUNGI KONSUMEN**

Disusun oleh :

EMY HANDAYANI, SH
NIM : B4A.099.049

Tesis ini telah diterima
Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Magister Ilmu Hukum

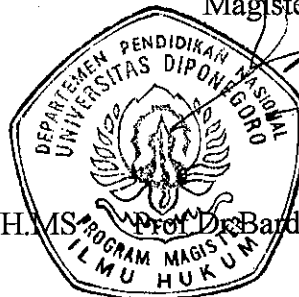
Mengetahui.

Pembimbing



Prof. Dr. Hj. Esmi Warassih Pujirahayu, SH, MS

Ketua Program
Magister Ilmu Hukum



Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
2001**

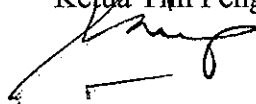
**PELAKSANAAN KONTRAK ALIH TEKNOLOGI
ANTARA PERUSAHAAN ASING DAN PERUSAHAAN NASIONAL DALAM
RANGKA MELINDUNGI KONSUMEN**

Oleh :
EMY HANDAYANI, SH
B4A.099.049

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan
di hadapan Tim Penguji
Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

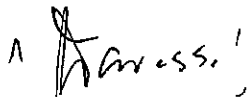
Hari : Kamis
Tanggal : 9 Agustus 2001

Tim Penguji,
Ketua Tim Penguji



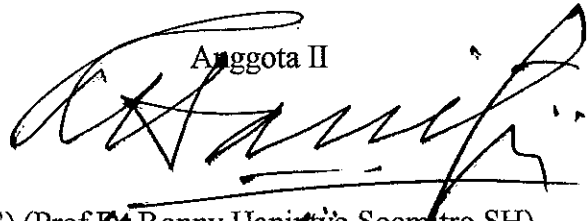
(Prof.Dr. Barda Nawawi Arief, SH)

Anggota I



(Prof.Dr. Esmi Warassih Pujirahayu,SH.MS)

Anggota II



(Prof.Dr. Ronny Hanitjo Soemitro,SH)

Anggota III



(Prof.Dr. Sri Redjeki Hartono,SH)

Motto :

“Orang-Orang yang besar adalah bukan orang-orang yang otaknya sempurna, melainkan orang-orang yang dapat mempergunakan yang terbaik dari otaknya yang sempurna”

“Hidup yang berharga adalah hidup yang dapat memberikan kehidupan kepada orang lain”

“Bukan dinamakan keberhasilan kalau tidak didahului dengan perjuangan”

Persembahan :

1. Ayah-Ibu Drs. H. Muchatif Adi
Subrata Tercinta dalam
memperhatikan studi penulis
2. Mamas tersayang yang senantiasa
memotivasi dan memberikan
dukungan terhadap penulis

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Tesis yang berjudul : “ PELAKSANAAN KONTRAK ALIH TEKNOLOGI ANTARA PERUSAHAAN ASING DAN PERUSAHAAN NASIONAL DALAM RANGKA MELINDUNGI KONSUMEN ”, ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini, masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangannya, maka dari itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi tersempurnanya tesis ini.

Untuk itu pada kesempatan ini, penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, SH.MS., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dari awal penulisan sampai akhir penulisan tesis ini.

Tidak lupa sebagai rasa hormat, bersama ini penulis menghaturkan rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Ir. Eko Budiharjo, M.Sc. selaku Rektor Universitas Diponegoro, dan Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum pada Universitas Diponegoro yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di lingkungan Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH selaku dosen yang selalu mengingatkan kepada para mahasiswa untuk peka dan kritis terhadap masalah-masalah sosial dan hukum dengan semboyan "*Publish or Perish*".
3. Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH selaku dosen yang banyak memberikan bekal pengetahuan tentang perkembangan di bidang hukum ekonomi.
4. Para guru besar pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro : Prof. Dr. Gunawan Setiardi, SH, Prof. Ronny Hanintyo Soemitro, SH, Prof. Dr. Miyasto, SH dan semua dosen yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.
5. Segenap rekan-rekan Program Magister Ilmu Hukum dan staf administrasi Sekretariat Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
6. Semua pihak yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung hingga terselesaikannya tesis ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini. Harapan penulis, tesis ini dapat membuka wawasan dalam hukum, ekonomi dan teknologi bagi pembaca serta demi nama baik almamater.

Semarang, 9 Juli 2001

Penulis

EMY HANDAYANI, SH

ABSTRAK

Kontrak alih teknologi merupakan faktor penguat terlaksananya peralihan dan pertukaran produk teknologi yang dihasilkan, dan kesepakatan bersama atau negosiasi oleh para pihak. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan para pihak dan juga konsumen yang memanfaatkan produk teknologi tersebut. Terlaksananya kontrak alih teknologi akan dipengaruhi faktor-faktor pendukung yang kuat untuk proses peralihan dan proses penerapan atau pengaplikasian bagi para pihak. Faktor-faktor yang dapat mendukung hal tersebut yakni kualitas sumber daya manusia, ekonomi, hukum, teknologi, norma, kultur/ budaya hukum, dan politik.

Penyimpangan kontrak dari pelaksanaan kontrak alih teknologi tentunya akan berdampak merugikan para pihak, khususnya akan dirasakan pihak penerima teknologi dan konsumen produk tersebut. Faktor yang mempengaruhi terjadinya kerugian bagi konsumen yaitu : kualitas produk berubah, harga yang rendah dan bahaya bagi kesehatan sehingga menimbulkan ketidakpuasan konsumen atas hasil produk alih teknologi.

Untuk membahas permasalahan yang timbul dari kontrak alih teknologi tersebut di atas, dilakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan socio-legal research artinya untuk dapat menjelaskan permasalahan tersebut. Penelitian ini tidak hanya melihat dari peraturan perundang-undangan yang ada melainkan peneliti mengkaitkannya dengan proses interaksi dalam kehidupan masyarakat selaku konsumen alih teknologi.

Keikutsertaan pemerintah serta tindakan intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah dapat berpengaruh terhadap pengembangan dan peningkatan alih teknologi serta penumbuhan tingkat kepercayaan khususnya dari pemerintah terhadap pihak asing, hubungan timbal-balik yang baik akan mempercepat proses peralihan teknologi dan pelaksanaan penerapan teknologi tersebut. Peningkatan kemampuan teknologi oleh pihak perusahaan nasional perlu didukung melalui pemasaran yang baik dalam mempengaruhi konsumen atas suatu produk teknologi

yang dihasilkan. Berbagai terobosan yang dilakukan oleh perusahaan dalam upaya meningkatkan kemampuan penyerapan teknologi dapat dilakukan ke dalam dan ke luar, untuk meningkatkan kemampuan nilai daya saing dan nilai tambah yang mendukung peralihan teknologi tersebut.

Perlindungan hukum perlu diterapkan diantara para pihak yakni perusahaan asing dan perusahaan nasional khususnya terhadap konsumen produk teknologi dalam kegiatan alih teknologi karena adanya hubungan hukum yang terus berjalan dan mengikat para pihak. Hukum berperan penting sebagai pelindung pihak yang menginvestasikan-pihak asing dan pihak penerima teknologi-pihak nasional dari pelaksanaan kontrak alih teknologi yang menyimpang sehingga dapat menghambat terciptanya iklim usaha yang sehat. Penciptaan iklim usaha yang sehat harus terus dikembangkan, melalui pengadaan sarana dan prasarana ekonomi yang memadai. Peraturan perundang-undangan yang mendukung pelayanan teknologi serta kebijaksanaan ekonomi makro yang tepat yang berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi berlandaskan kemampuan dan kekuatan sendiri dengan pemanfaatan modal, teknologi, keahlian yang tersedia dari pihak perusahaan - asing terhadap pihak perusahaan - nasional dapat mengembangkan pengalihan teknologi.

ABSTRACT

Technology transferring contract is the supporting factor for the implementation for the product exchange and transfer, which is begun among the organization among parties. It is aims to protect the necessities of the parties and consumers who makes use of the product. Implementation of transferring contact must inflict a loss upon the parties, especially the receivers and consumers who use the product. The factor, which influence the detriment for the consumers include, the change of quality, the low price, and the danger for health. Those fact make the consumers, unsatisfaction that cause the lost of trust for the technological products.

In the development and improvement of technology, the government's participation will strongly support gut the intervention which is done by the government will hamper the process. The emergence of trust rate, especially from the government toward the foreign parties, should be maintained, and reciprocal relationship must accelerate the process of technological transfer and implementation of technological application.

To discus problem in technology transferring contract above to perform research with sociological research, it means for explain problem mentioned above it. This research not only shown from rule of law existing but research with hook interaction process in civil society as consumers for technological product.

Government to join a long with get affect towards to expand and to increase technology transferring and to make grow level of trust for government towards foreign parties to pass mutual accelerate the process of technological product. The improvement of technological ability attracting consumers for a technological product. The acts of penetration which is done by the company to increase the ability of technological absorption can be performed inwardly and outwardly, to improve the competitive abilities and plus value which support the technological transferring.

The law protection needs to be implanted as the technological transferring activities are the law connection which runs continually, among many parties are the foreign and national parties, especially the consumers of technological product. Consequently, the role of law in the competitive rate of the efforts is aimed to protect the investor and receiver from the divergence of the technological transferring contract which will impeded the health business climate should be developed continually, through the provision of economical means and infrastructures. The law regulations which support the technological service as well the macro economical policies which suistable and strongly related to the economical development, based on the ability and self-force by capital exploitation, technology, skill which is served by the foreign company to the national one for improving the technological transfer.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	xi
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	3
C. Kerangka Teoritik	4
1.Paradigma dan Teori	7
2.Penjelasan Konsep	10
D. Tujuan Penelitian	23
E. Kontribusi Penelitian	24
F. Metode Penelitian	24
1. Spesifikasi Penelitian	24

2. Metode Pendekatan	25
3. Lokasi Penelitian	25
4. Jenis dan Sumber Data	25
5. Teknik Pengumpulan Data	26
6. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	27
7. Instrumen Penelitian	28
8. Analisis Data	28
9. Sistematika dan Pertanggung Jawaban	30
 BAB II. PELAKSANAAN KONTRAK ALIH TEKNOLOGI	
DI PT. SEPATU BATA INDONESIA.....	34
A. Dasar Hukum Pendirian	34
B. Sistem Manajemen	35
1. Produksi	37
2. Pengendalian Mutu	38
3. Pemasaran	39
C. Cara Teknologi Dialihkan	40
1. Licensing atau franchising	40
2. Sub-contracting	40
3. Equipment Of Material Supplier	41
B. Teknologi Yang Secara Aktual Dialihkan	42
1.Kemampuan Mengalihkan Yang Dimiliki Perusahaan	
Pemasok	42

2 .Kemampuan Menyerap Yang Dimiliki Perusahaan	
Penerima	42
3.Kuantum Atau Kerumitan Teknologi Yang Dialihkan	43
4.Model dan Cara pengalihan teknologi	44
5.Kesenjangan antara pemasok dan penyerap teknologi	45
a.Manajemen	46
b.Tenaga Kerja dan Pelatihan	46
c.Riset dan Pengembangan	47
F.Kontrak Bata Ltd dengan PT. Sepatu Bata Indonesia	48
G.Kontrak PT. Sepatu Bata dengan Kontraktor	55
H.Anak Asuh PT. Bata Indonesia	57
BaB III. PELAKSANAAN KONTRAK DAN DAMPAK YANG DIRASAKAN	
KONSUMEN AKIBAT PERALIHAN TEKNOLOGI	
1. Analisa Kontrak	59
a. Syarat-Syarat Kontrak Dan Tujuan Kontrak	61
b. Norma Kontrak	65
2. Faktor-Faktor Non Hukum dalam Proses Pembuatan Kontrak	69
a. Kualitas Sumber Daya Manusia	71
b. Ekonomi	74
c. Hukum	75
d. Teknologi	79
e. Perbedaan Norma Dengan Perusahaan Asing	82

f. Perbedaan Kultur Hukum Terhadap Alih Teknologi	83
g. Politik	83
C. Dampak Penyimpangan Kontrak : <i>Merugikan Konsumen</i>	84
1.Kualitas Produk Berubah	84
2.Harga Rendah	86
3.Bahaya Kesehatan	87
BAB IV. PENINGKATAN PENGUASAAN TEKNOLOGI	
DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN	
A. Pemerintahan Dalam Pengembangan Teknologi	89
a. Peningkatan “Kaderisasi” Ketrampilan Teknologi	90
b. Pencapaian Keunggulan Teknologi	93
B. Pelaksanaan Struktur Perusahaan Sebagai Upaya Peningkatan Penyerapan Kemampuan Teknologi	95
C. Aspek Hukum Dan Kemajuan Teknologi Dalam Penciptaan Iklim Usaha Yang Sehat	99
Bab V. PENUTUP	
a. Simpulan	114
b. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	122
A. Yang Berhubungan Dengan Deskripsi Lokasi dan Produksi	
1.Pendiri Pusat Bata Internasional di Toronto, Canada	

2. Peta Lokasi PT. Sepatu Bata Indonesia di Jakarta Selatan
3. Jenis Produksi dari PT Sepatu Bata Indonesia
4. Contoh Merek Sepatu yang diproduksi PT Sepatu Bata Indonesia
5. Induk PT Sepatu Bata Indonesia dan Manajemen Pelatihan
6. Pengujian Standar Mutu Produksi
7. Laboratorium Pengembangan dan Tempat Produksi

B. Yang Berhubungan Dengan Penulisan Tesis

1. Bagan : Rancangan Proposal Tesis
2. Hasil Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan alih teknologi (transfer of technology), sebenarnya merupakan permasalahan yang akrab dengan pembangunan ekonomi negara-negara berkembang. Karena, di negara-negara berkembang terdapat suatu “mitos” yang menyatakan, bahwa untuk menjadi negara yang makmur harus memiliki industri yang maju. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi harus diarahkan kepada sektor industri ini dapat menjadi tulang punggung perekonomian nasional.¹ Didalam pembangunan ekonomi, teknologi dapat berperan sebagai pertumbuhan ekonomi.²

Kemampuan atau penguasaan teknologi adalah menggunakan teknologi dengan efektif, dan upaya teknologi mengacu pada ihtiar secara sadar untuk menggunakan informasi teknologi dan menghimpun pengetahuan teknologi untuk memilih, membaurkan, menyesuaikan atau menciptakan teknologi. Upaya ini diperlukan untuk menilai dan memilih teknologi; untuk memperoleh dan mengoperasikan proses dan menghasilkan produk; untuk mengadakan perubahan pada produk, proses dan prosedur, dan perencanaan organisasi; dan untuk

¹ Perhatikan Garis-Garis Besar Haluan Negara

² J. Davidson Frane, **International Business and Global Technology**, DC Heat and Company, Lexington, 1984, hal. 7

menciptakan teknologi baru. Alih teknologi dalam praktek merupakan alih teknologi yang berhak-paten dan tidak berhak-paten melalui berbagai cara termasuk diantaranya persetujuan kontrak alih teknologi dalam konteks usaha patungan antara perusahaan asing dan perusahaan nasional (lokal) yang berbeda-beda dan cenderung pengalihan teknologi tidak berjalan secara otomatis.

Oleh karena itu, kontrak alih teknologi antara perusahaan asing dan perusahaan nasional selalu menyangkut : (a) adanya unsur asing / internasional, (b) penggunaan bahasa hukum, dan (c) klausul-klausul yang berbeda dengan sistem hukum internasional dan penerapan hukum internasional / hukum transnasional.³

Didalam praktek, arus teknologi memang berjalan sangat bebas, dari segi hukum sendiri, tidak ada hambatan bagi masuknya teknologi asing ke Indonesia. Semua kontrak yang berkaitan dengan pengalihan teknologi asing dilindungi asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

Kontrak yang dibuat untuk melaksanakan alih teknologi digunakan sebagai dasar pelaksanaan alih teknologi, undang-undang dan pelaksanaannya dan mengatur hubungan para pihak secara kontraktual.

Pada dasarnya yang dikehendaki pada suatu alih teknologi adalah terjadi alih teknologi bilamana pihak penerima menguasai rahasia teknologi itu, mampu mengembangkan lebih lanjut, dengan cara meniru, memasang, membongkar dan kemudian dipasang lagi atas produk teknologi asing. Misalnya dalam pembuatan

alas kaki sepatu bata yang teknologinya dialihkan oleh pihak asing secara langsung dan pihak nasional hanya dapat memasang produk tersebut dan tidak diperkenankan untuk memperoleh teknologi dalam pembuatan teknologi atas alas kaki karena pihak asing berkomitmen dalam mengadakan kontrak alih teknologi terhadap alas kaki tersebut karena merupakan rahasia teknologi yang tidak dapat dialihkan terhadap pihak nasional.

Ada semacam keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi ditujukan pada penguasaan segala macam teknologi, termasuk teknologi canggih⁴ melalui kontrak alih teknologi.

Persoalan mendasar yang dihadapi dalam pelaksanaan kontrak alih teknologi antara perusahaan asing dan perusahaan nasional dalam hal ini : manajemen kontrak alih teknologi antara pihak asing dan pihak Indonesia, penyimpangan kontrak alih teknologi yang merugikan konsumen, usaha yang dilakukan pemerintah dalam pengembangan teknologi dan perusahaan dalam meningkatkan kemampuan penyerapan teknologi, serta aspek hukum dan kemajuan teknologi dalam penciptaan iklim usaha yang sehat akan kita kaji lebih dalam lagi.

³ Lihat Soemantoro, **Kerjasama Patungan dengan Modal Asing**, Alumni, Bandung, 1984, hal. 23.

⁴ Menristek Habibie berkali-kali menekankan pentingnya kita menguasai segala macam teknologi canggih, untuk menghasilkan pendapatan nasional, **Sintesis No. 16**, Jakarta, Juli – Agustus 1996, hal. 28 – 30.

B. Permasalahan

Untuk menjawab permasalahan tersebut, diperlukan informasi dan data melalui penelitian dengan pertanyaan sebagai berikut :

1. Apa yang harus diperhatikan dalam manajemen kontrak alih teknologi antara perusahaan asing dan perusahaan nasional ?
2. Apakah dampak dari pelaksanaan kontrak yang menyimpang sehingga merugikan konsumen ?
3. Bagaimana usaha yang dilakukan pemerintah dalam pengembangan teknologi dan apa yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kemampuan penyerapan teknologi ?
4. Bagaimana aspek hukum dan kemajuan teknologi dapat menciptakan iklim usaha yang sehat ?

C. Kerangka Teoritik

Aliran *Legal Realism* yang berkembang di Amerika Serikat yang mengatakan bahwa dalam mempelajari hukum, pengetahuan mengenai *law in action*⁵ sampai sekarang masih dianut dalam ilmu hukum.

Law in the book dalam metode penelitian hukum diimplementasikan dalam *paradigma penelitian hukum doktriner*, yaitu penelitian inventarisasi hukum positif, asas-asas hukum, penemuan hukum *in concreto* / klinis, sistem hukum dan sinkronisasi hukum.

Sedangkan *law in action* diimplementasikan dalam *paradigma penelitian hukum non doktriner* yaitu memahami dan meneliti hukum dalam konteks sosialnya karena fokusnya lebih menyangkut pada persoalan bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Dalam rangka mempelajari hukum secara *law in action*, hukum bukanlah suatu gejala normatif yang otonom tetapi lebih bersifat fenomena sosial. Maksudnya bahwa dalam penelitian hukum ini diperlukan adanya bantuan dari ilmu lainnya sebagai pendukungnya, baik dari sudut metode maupun teori. Metode penelitian seperti ini sering juga disebut dengan *socio-legal research*.

Menurut Antonie A. G. Peters⁶ terdapat paling sedikit 3 (tiga) perspektif fungsi hukum dalam masyarakat, yaitu :

Pertama, perspektif kontrol sosial dari hukum yang merupakan salah satu dari konsep-konsep yang biasanya paling banyak digunakan dalam studi-studi kemasyarakatan. Dalam perspektif ini, fungsi utama suatu sistem hukum bersifat integratif karena dimaksudkan untuk mengatur dan memelihara regularitas sosial dalam suatu sistem sosial. oleh sebab itulah Berger⁷ secara tepat mengemukakan tidak ada masyarakat yang bisa hidup langgeng tanpa kontrol tersebut, Parsons⁸ mengemukakan 4 (empat) prasyarat fungsional dari suatu sistem hukum, yaitu :

⁵ Ronny Hanitjo Soemitro, *Studi Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1985, hal. 38.

⁶ Ibid, hal. 10

⁷ Peter L. Berger, *Invitation to Sociology : A Humanistic Perspective*, (Alih Bahasa Danie Dhakidae).

⁸ Penjelasan yang relatif lengkap tentang usulan Parsons ini, lihat dalam alih bahasa Tom Campbell, *Tujuan Teori Sosial (Sketsa, Penilaian dan Perbandingan)*, Kanisius, Yogyakarta, 1994, hal. 220 – 230.

(1) masalah dasar legitimasi, yakni menyangkut ideologi yang mendasari penataan aturan hukum, (2) masalah hak dan kewajiban masyarakat yang menjadi sasaran regulasi hukum beserta proses hukumnya, (3) masalah sanksi dan lembaga yang menerapkan sanksi tersebut, dan (4) masalah kewenangan penegakan aturan hukum.

Kedua, perspektif **social engineering**, yang merupakan tinjauan yang paling banyak dipergunakan oleh para pejabat (**the officials perspective of the law**) untuk menggali sumber-sumber kekuasaan apa yang dapat dimobilisasikan dengan menggunakan hukum sebagai mekanismenya. Dengan mengutip para penganut perspektif **social engineering by law**, Satjipto Rahardjo⁹ mengemukakan ada 4 (empat) syarat utama yang harus dipenuhi agar suatu aturan hukum tergolong eigenaar, yaitu : (1) penggambaran yang baik dari situasi yang dihadapi, (2) analisa terhadap penilaian-penilaian dan menentukan jenjang nilai-nilai, (3) verifikasi dari hipotesa-hipotesa, dan (4) adanya pengukuran terhadap efek dari undang-undang yang berlaku.

Ketiga, perspektif emansipasi masyarakat terhadap hukum. Perspektif ini merupakan tinjauan dari bawah terhadap hukum (**the bottom up view of the law**). Hukum dalam perspektif ini meliputi obyek studi seperti misalnya kemampuan hukum sebagai sarana penampung aspirasi masyarakat, budaya hukum, kesadaran hukum, penegakan hukum dan lain-lain.

Berkaitan dengan hal ini, peranan hukum sebagai **social engineering** ternyata semakin berkembang dalam kehidupan masyarakat. sehingga peranan hukum sendiri dibutuhkan dalam masyarakat modern dengan kebutuhan yang semakin kompleks. Dengan demikian hukum modern merupakan suatu proses yang ditempuh secara sadar untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam masyarakat dan hukum bertujuan mengatur masyarakat secara efektif dengan menggunakan aturan-aturan hukum yang dibuat dengan sengaja.¹⁰

Berkaitan dengan pemecahan masalah penelitian ini diperlukan bantuan suatu paradigma sosial. Paradigma adalah suatu jendela dimana peneliti akan memahami dan menafsirkan secara obyektif berdasarkan kerangka acuan yang terkandung dalam paradigma sosiologi yang dipilihnya.¹¹

1. Paradigma dan Teori

Adapun paradigma yang dipergunakan adalah *paradigma definisi sosial*, yang memandang manusia sebagai orang yang aktif menciptakan kehidupan sosialnya sendiri, tidak memandang manusia sebagai individu yang statis dan terpaksa dalam bertindak, fokus perhatian paradigma ini

⁹ Satjipto Rahardjo, **Pemanfaatan Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum**, Alumni, Bandung, 1977, hal. 66.

¹⁰ David M. Turbeck dalam Wukir Prayitno, **Modernitas Hukum Berwawasan Indonesia**, Agung, Semarang, 1991, hal. 39.

¹¹ Zamroni, **Pengantar Pengembangan Teori Sosial**, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1992, hal. 22.

terletak pada bagaimana caranya manusia mengartikan kehidupannya sosialnya atau bagaimana caranya mereka membentuk kehidupan sosial yang nyata.¹²

Meneliti hukum dalam perspektif paradigma definisi sosial berarti mengkonsepkan hukum sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial, sebagaimana tampak dalam interaksi-interaksi antar mereka, maka orientasinya harus berpijak pada teori interaksi simbolis.¹³

Secara rinci kegiatan penelitian yang menggunakan paradigma ini mempunyai sasaran pokok yang meliputi :

1. Tindakan manusia yang mengandung makna subyektif, meliputi beberapa tindakan nyata;
2. Bahwa tindakan nyata tersebut adalah bersifat batiniyah dan bersifat subyektif;
3. Tindakan itu sengaja diulang;
4. Tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain.

Analisa dalam teori interaksionisme - simbolis bersumber dari aspek-aspek perilaku dari manusia yang subyektif dan interpretative. Di sini manusia tidak dilihat sebagai produk yang ditentukan oleh struktur atau

¹² George Ritzer, **Sociology : A Multiple Paradigm Science**, (terjemahan Alimandan), Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 105.

¹³ Soetanyo Wignjosebroto, **Konsep Hukum, Tipe Kajian dan Metode Penelitiannya**, Hand Out, Semarang, 1995, hal. 4.

situasi obyektif, akan tetapi paling tidak sebagian merupakan aktor-aktor yang bebas.¹⁴

Menurut teori ini tindakan / perilaku manusia itu selalu berdasarkan pada simbol-simbol. Hal ini karena tindakan manusia bukan disebabkan oleh “kekuatan dalam”, dalam arti individu bukan dikelilingi obyek-obyek potensial yang mempermainkannya dan membentuk obyek-obyek itu, misalnya berpakaian atau mempersiapkan diri untuk karier professional. Individu sebenarnya sedang merancang obyek-obyek yang saling berbeda, memberi arti, menilai kesesuaiannya dengan tindakan, dan mengambil keputusan berdasarkan penilaian tersebut. Inilah yang dimaksud dengan penafsiran atau bertindak berdasarkan simbol-simbol.¹⁵

Pendekatan interaksionisme - simbolik ini berasumsi bahwa pengalaman manusia ditengahi oleh penafsiran, obyek, orang, situasi dan peristiwa yang tak memiliki pengertiannya sendiri, tetapi makna atau pengertian itu diberikan untuk mereka. Makna tersebut berasal dari interaksi dengan orang lain Sebagaimana dinyatakan oleh Blummer : “bagi seseorang, makna dari sesuatu berasal dari cara-cara orang bertindak terhadapnya dalam kaitannya dengan sesuatu itu”.

¹⁴ Margaret M. Poloma, **Contemporary Sociological Theory**, (terjemahan Yasogama), Raja Grafindo, Jakarta, 1994, hal. 259.

¹⁵ Herbert Blummer dalam Margaret M. Poloma, *Ibid*.

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh mereka akan melahirkan batasan-batasan sesuatu bagi orang lain.¹⁶

Dengan demikian interaksi-simbolik itu bertumpu pada 3 (tiga) premis, yaitu :¹⁷

1. Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka;
2. Makna-makna tersebut berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain;
3. Makna-makna tersebut disempurnakan pada waktu proses interaksi berlangsung.

Jadi tanggapan seseorang tidak dibuat secara langsung terhadap tindakan orang lain, tetapi didasarkan pada makna yang diberikan terhadap tindakan orang lain itu. Interaksi antar individu, diantarai oleh penggunaan symbol-symbol, interpretasi atau dengan saling berusaha untuk saling memahami maksud dari tindakan masing-masing. Jadi dalam proses interaksi manusia bukan suatu proses dimana adanya stimulus secara otomatis dan langsung menimbulkan tanggapan atau respon. Tetapi antara stimulus yang diterima dan respon yang terjadi sesudahnya, diantarai oleh proses interpretasi oleh si

¹⁶ Margaret M. Poloma, Ibid, hal. 260.

¹⁷ Zamroni, *Op. Cit.*, hal. 23

aktor. Jelas proses interpretasi ini adalah proses yang merupakan kemampuan yang khas dimiliki manusia.¹⁸

2. Penjelasan Konsep

Secara teoritis usaha atau kerjasama patungan (antara perusahaan asing dan perusahaan nasional) dapat menampung kepentingan kedua belah pihak, karena bagaimanapun masing-masing pihak mempunyai kelebihan dan kekurangan yang dapat saling melengkapi dalam suatu kerjasama mutualistik dan saling menguntungkan.

Dalam hal ini Dj. A. Simarmata¹⁹ mengatakan :

“Usaha patungan (joint venture) adalah perusahaan yang dibentuk oleh beberapa perusahaan dalam dan luar negeri. Satu hal yang menonjol”
Masing-masing pihak bekerjasama mempunyai kekuatan dan kelemahan komplementer dalam membentuk usaha yang dapat diandalkan keampuannya. Pihak luar negeri dapat memiliki teknologi yang baik, seperti manajemen, sistem produksi, ketrampilan, serta koneksi internasional dalam pemasaran produksi, sedang pihak domestik memberi sumbangan misalnya penyediaan tanah untuk usaha, penguasaan situasi domestik baik aspek-aspek hukum ataupun politik lokal. Dalam bentuk ini pihak domestik akan memperoleh *transfer of technology*, demikianpun negara penerima investasi”.

¹⁸ George Ritzer, *Op. Cit.*, hal. 61.

Alih teknologi menurut UNTAD adalah : setiap cara pengalihan hak-hak teknologi baik yang berbentuk hak milik maupun tidak dengan tanpa mempersoalkan bentuk hukum cara pengalihannya, termasuk transaksi teknologi yang dilakukan oleh subsidiary atau afiliasi yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh perusahaan patungan (nasional dan asing) lainnya serta perusahaan patungan yang sebagian sahamnya dimiliki orang asing.

Alih teknologi atau transfer of technology dapat juga berarti :

- a. Pengalihan ilmu tentang teknologi, dan
- b. Pengalihan ketrampilan, pengalaman dan seni mengenai teknologi tertentu (know how).
- c. Cara mengalihkan sebagian atau seluruh hak monopoli itu kepada pihak yang semula tidak memiliki ketrampilan dan pengalaman atau tidak menguasai seni yang dipatentkan itu.²⁰

Pengalihan teknologi bukan hanya sekedar merupakan pemindahan saja, akan tetapi terutama bahwa teknologi yang tadinya asing itu, harus dapat diadaptasikan ke dalam lingkungan yang baru, dan kemudian harus terjadi asimilasi serta inovasi sedemikian rupa sehingga teknologi asing akhirnya menjadi bagian daripada kebudayaan bangsa yang menerima teknologi asing itu.

¹⁹ Dj. A. Simarmata, **Pendekatan Sistem dalam Analisa Proyek Investasi dan Pasar Modal**, Gramedia, Jakarta, 1984, hal. 23.

²⁰ Lihat Soenarjati Hartono, **Aspek-aspek Hukum Pengalihan Teknologi**, dalam Seminar Aspek-aspek Hukum Alih Teknologi, Kerjasama FHUI – BPPT, Jakarta 6 Februari 1986, hal. 2.

Dalam alih teknologi, minimal ada dua pihak yang terlibat, yaitu yang menguasai teknologi / pemberi teknologi dan yang ingin memiliki atau membutuhkan teknologi / penerima teknologi. Bagi pihak yang menguasai teknologi dan ingin mengalihkannya pada pihak / negara lain yang membutuhkannya, ada empat macam wahana yang dapat dipakai :

pertama melalui ekspor barang / jasa dimana teknologi sekaligus terbawa serta dalam kegiatan tersebut,

kedua memberi lisensi terhadap teknologi yang bersangkutan,

ketiga, dengan cara mendirikan anak perusahaan yang modalnya dikuasai sepenuhnya di tempat dimana teknologi akan dialihkan,

keempat dengan cara mendirikan perusahaan patungan (joint venture company) antara pemilik teknologi dengan pihak yang menginginkan terjadinya teknologi.²¹

Dalam pengalihan teknologi ada tahapan tertentu yang harus dilalui, yaitu **Pertama** tahap identifikasi, merupakan tahap pengidentifikasian teknologi sesuai dengan pemanfaatannya dan pendataan untuk memperkirakan seluruh peluang / akses yang muncul terhadap penggunaan teknologi tersebut.

Selanjutnya tahap negosiasi, penerima teknologi telah dapat memproyeksikan pengoperasian teknologi yang dimaksud.

²¹ Dimiyati Hartono, **Hukum dan Alih Teknologi**, Majalah Hukum Kaligawe, Semarang, Edisi 14, Agustus, 1998, hal. 5.

Tahap yang terakhir adalah tahap implementasi dimana alih teknologi sudah berlangsung sesuai dengan yang disepakati antara kedua belah pihak untuk mengatasi masalah alih teknologi yang sekarang sedang dihadapi, penguatan pihak Indonesia dalam kemampuan negosiasi atas teknologi perlu segera dilakukan sehingga tidak terjebak dalam hal-hal yang merugikan.

Sudah barang tentu, dalam hal alih teknologi yang dilakukan oleh perusahaan patungan baik perusahaan nasional dan asing akan timbul ketegangan, karena adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan patungan dengan negara penerima. Disatu pihak orientasi perusahaan patungan adalah memberikan keuntungan sebesar-besarnya dan pihak penerima menjadi tuan rumah yang menginginkan pertumbuhan ekonomi negaranya guna meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.²²

Bila diperhatikan pengertian alih teknologi yang telah diuraikan diatas, maka **teknologi** dapat menjadi bagian modal yang diinvestasikan mitra asing sebagaimana dimaksud pasal 2 (b) UU No. 1 / 1967 tentang PMA yang menyatakan : oktroi atau penemuan-penemuan penanam modal untuk dipakai dalam perusahaan yang dibuka di Indonesia serta peraturan pelaksanaan lainnya diantaranya Tap MPRS No. XXIII / 1966 tentang Pembaharuan Kebijakan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan ; Undang-Undang No. 11 / 1967 tentang

²² Djauhari, **Alih Teknologi Dalam Penanaman Modal Asing Sebagai Upaya Menopang Pembangunan Nasional**, Majalah Hukum Kaligawe, Semarang, Edisi 4, Agustus 1994, hal. 48.

Pertambangan ; serta Undang-Undang No. 12 / 1997 tentang Paten, kebijaksanaan-kebijaksanaan lain yang berkaitan dengan PMA.

Pengalihan teknologi melalui investasi asing berdasarkan UUPMA, yang mengharuskan investor asing mengalihkan teknologinya, tetapi belum mencapai iklim dan sarana yang mendorong ke arah pengalihan teknologi yang tepat guna bagi rakyat banyak. Indonesia masih tetap mengalami kemunduran dalam mengambil alih teknologi asing dan mengembangkannya, apalagi sistem penanaman modal itu sendiri tidak memungkinkan pihak Indonesia memilih teknologi yang diinginkan, karena perusahaan PMA di Indonesia hanya afiliasi induk perusahaan yang berada di luar negeri, dan berada di bawah pengawasan asing.²³ Hal ini dapat dibuktikan dalam pembahasan hasil penelitian yang tertuang dalam Bab IV dengan begitu dimungkinkan terciptanya suatu iklim yang sehat terhadap teknologi yang dihasilkan dalam pengalihan tersebut. Dengan kata lain, relevansi kapabilitas teknologi dengan penguatan daya saing pihak nasional dalam menghadapi era kemajuan teknologi yang mengarahkan usahanya dalam rangka peningkatan kemampuan penguasaan dan pengembangan teknologi.

Dengan dimungkinkannya adanya alih teknologi dalam penanaman modal, maka mau tidak mau terjadi adanya pergeseran nilai dalam proses peralihan tersebut, karena pihak yang menanamkan modal biasanya bersifat individualistik, untuk itu kita harus dapat memahaminya, jangan a priori anti

²³ Ibrahim Idham, **Lisensi dan Peranan Pemerintah**, Majalah Hukum dan Pembangunan, Edisi 1, Februari, 1990, hal. 41.

kepada apa yang berasal dari zamannya individualisme, kapitalisme atau liberalisme, harus realistis dan berpegang pada kepentingan dan keuntungan rakyat banyak.²⁴ Dengan demikian pergeseran nilai dalam proses peralihan teknologi dari pihak asing terhadap pihak nasional sangatlah dominan sehingga memungkinkan timbulnya perubahan nilai dalam masyarakat yang mempunyai hubungan erat dengan hukum dan pengalihan teknologi sebagai alat pengendalian sosial untuk menghadapi tantangan kepentingan-kepentingan baik terhadap pihak nasional maupun terhadap pihak asing dalam pelaksanaan kontrak alih teknologi.

After the law of foreign investment was legitimated as a government policy, the transfer of technology could be applied although no special law of transfer technology until now. The process of transfer of technology through the function of social control and social engineering met some obstacles, either "from aspect of regulation or making contract with foreign investment."²⁵

Dalam hal ini memang teknologi yang dialihkan mengarah pada ketergantungan teknologi yang berkelanjutan, pihak nasional tergantung pada penyediaan teknologi yang berkelanjutan, pihak nasional tergantung pada penyediaan teknologi pihak asing dalam sudut pandang sosial yang cenderung menggunakan kemampuan teknik dengan keterbatasan, kurang efisien dan menghindari sumber tenaga asing dengan jalan mengembangkan teknologi yang cocok dengan landasan kemampuan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta dana

²⁴ Rudi Prasetya, **Justicia**, Majalah Hukum Universitas Lampung, Edisi 21, Tahun VII, 1999, hal. 170.

²⁵ Elman Eddy Poetra, **Justicia**, Majalah Hukum Universitas Lampung, Edisi 21, Tahun VII, 1999, hal. 175.

yang memadai. Hal ini diuraikan dalam Bab III, sehingga dalam proses alih teknologi memang sangat diperlukan sumber daya manusia yang dapat meningkatkan penguasaan dan pengembangan teknologi pihak nasional untuk memperoleh keunggulan komparatif dalam hal kemampuan, standar dan kualitas untuk menciptakan teknologi yang berkesinambungan dengan produk teknologi asing yang masuk dibongkar, ditiru dan diadaptasi dan akhirnya dipasang lagi.

Demikian pula *The International transfer of technology takes place when knowledge in one country is communicated to people in another country, for use there. Since technology is a body of knowledge transferred by learning process, then the succesfull transfer is determined both by the complexity of the knowledge involved and the initial capabilities of the recipient. If these two aspects matched each other, then the transfer become easier, quicker and smoother ; but if there is gap, certain efforts must be made, generally in the form of training and education. Thus, training and education are not just for promoting domestic technological efforts but they also served as an indicator of absorptive capacity.*²⁶

Untuk itu keberhasilan dalam alih teknologi mendominasi berbagai kerumitan pengetahuan dan kemampuan negara penerima teknologi biasanya dalam bentuk pelatihan dan pendidikan untuk memajukan usaha teknologi dan melayani indikator kemampuan menyerap. Dalam kasus Sepatu Bata pembuatan produk alas kaki yang didasarkan atas trend internasional dikombinasikan dengan jenis-jenis produk pokok Bata yang terlaris, sehingga Sepatu Bata Indonesia atau Sepatu Bata Tbk ini akan lebih fleksibel dan mengacu pada penjualan dalam

²⁶ Presented by Jusmaliani at the conference of **Japan's Role in the Transfer of Technology in the ASEAN Countries**, Bangkok, May 29-30, 1992.

pengoperasian produksi baik dilihat dari sudut kuantitas maupun kualitas disertai dengan kemajuan yang mantap dalam mengembangkan berbagai produk baru dengan desain inovatif, bergaya modern dan harga terjangkau dalam upaya meraih peluang pasar melalui alih teknologi alas kaki dibawah merek-merek lisensi seperti Winbrener, Buble Gummers, Hawaianas, Marie Claire, Emozioni, North-Star, Power seperti yang akan diuraikan dalam Bab II yakni Deskripsi Perusahaan Sepatu Bata dan lampiran 3.

Dalam *Managing International Transfer of Technology A Case Study of IDPL* dinyatakan bahwa *International transfer of technology is one very effective way of ushering in technological change within an enterprise. Yet it is seldom realized that the process of international transfer of technology is a very complex one and its management requires high skills, team work across borders, clear understanding of the entire process and strategic management.*²⁷

Alih teknologi merupakan jalan efektif untuk perubahan teknologi pada perusahaan dan sangat kompleks dan membutuhkan keahlian tinggi dalam proses dan strategi manajemen perusahaan PT Sepatu Bata dalam mengembangkan produk alih teknologi dengan desain yang inovatif, modern, bergaya dan harga terjangkau agar konsumen merasa terlindungi untuk tetap mempertahankan produksinya dengan SDM yang berkemampuan untuk menyerap alih teknologi dari pihak asing kendati teknologi yang dialihkan relatif rumit dibawah suatu model pengalihan teknologi *franchising*.

²⁷ B. Joshi, *Managing International Transfer of Technology A Case of IDPL From India*, October 1990, hal. 131.

Untuk itu, *technological change must be seen as involving a complex inter-action of factors some of which are internal to the firm and others external to it. For analytical purposes it is useful to distinguish between the macro level there are the economic policies which determine the environment in the terms of opportunities and constraints for the management of firms.*²⁸

Dengan demikian perubahan teknologi harus terlihat dalam beberapa faktor interaksi internal dan eksternal perusahaan meliputi aspek makro dan mikro, manajemen perubahan teknologi, kebijakan ekonomi yang menentukan syarat-syarat tepat dan mendesak untuk manajemen perusahaan. Maka perubahan teknologi sebagai pengalihan teknologi ada kebijakan ekonomi yang menentukan syarat-syarat tepat dan mendesak untuk manajemen perusahaan dan perubahan teknologi sebagai pengalihan teknologi asing terhadap pihak nasional haruslah selektif mencangkok nilai budaya baru melalui alih teknologi yang akan diterimanya dalam usaha mengembangkan, menguasai, mengadopsi suatu teknologi modern yang ditransfer pihak asing (eksternal perusahaan). Dalam hal ini Bata Ltd mengembangkan program *elixir vitae* yang merupakan pengembangan manajemen bagi SDM yang berpotensi dan berkinerja tinggi bertujuan untuk menciptakan kumpulan orang berbakat sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan PT. Sepatu Bata akan tenaga trampil dan professional yang ahli dalam bidang sepatuan (internal perusahaan).

²⁸ Ushar Dar, Summary Proceedings of The Inaugural Session on **Managing of Technology Change**, October 1999, hal. 1.

Sehingga pelaksanaan kontrak alih teknologi di Indonesia didasarkan pada kebijaksanaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tercantum dalam GBHN Bab III, Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang yaitu : pembangunan ekonomi mempunyai pengolahan kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil melalui **penanaman modal, penggunaan teknologi** serta melalui penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen.

Penggunaan teknologi akan mengakibatkan perubahan masyarakat. Dengan demikian antara hukum dan pengalihan teknologi (*transfer of technology*) serta perubahan masyarakat mempunyai hubungan yang erat. Sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto, bahwa “hukum adalah suatu gejala sosial budaya yang berfungsi untuk menerapkan kaidah dan pola-pola perilaku terhadap individu-individu dalam masyarakat.”²⁹ Oleh sebab itu, hukum itu harus berperan sebagai alat untuk merubah masyarakat. Di dalam proses perubahan tersebut, ada suatu kekuatan yang menjadi pelopor perubahan. Keadaan perubahan yang diakibatkan oleh penggunaan teknologi telah membawa dampak bagi pembangunan di Indonesia dewasa ini khususnya dalam bidang hukum dan akan membawa pengaruh perubahan dalam bidang sosial politik, ekonomi dan alih teknologi.

Pada hakekatnya, **alih teknologi** itu merupakan perbuatan hukum yang bersifat transnasional yang seringkali melibatkan perusahaan asing dan

²⁹ Lihat Soerjono Soekanto, **Pokok-pokok Sosiologi Hukum**, Rajawali, Jakarta, 1980, hal. 17.

perusahaan nasional dan sistem hukum yang lain. namun demikian, hukum yang terlibat dalam pengalihan teknologi, hanya merupakan salah satu alat pengendalian sosial dan menghadapi tantangan-tantangan kepentingan nasional dan asing dalam pelaksanaan kontrak alih teknologi. Pada umumnya **teknologi** adalah pengetahuan yang dapat disusun dan ditiru. Teknologi juga mempunyai sifat yang meneruskan yaitu bahwa teknologi dapat dialihkan seperti yang telah dikemukakan di atas. Adapun teknologi itu dapat dialihkan secara horizontal³⁰ dari suatu cabang perusahaan asing ke perusahaan nasional. Unsur teknologi yang diberikan oleh perusahaan asing dalam joint venture memiliki kualitas dan sifat teknologi diberikan akan lebih dituangkan secara eksplisit dalam bentuk kontrak antara pihak asing dan pihak nasional. Ini disebabkan karena adanya andil dalam pengawasan dan kepentingan para pihak. Demikian pula, jika kita ingin mengetahui level / tingkat kontrak alih teknologi yang terjadi di Indonesia sangat tergantung dalam pengembangan teknologi bertaraf tinggi dimana teknologi yang didapat merupakan teknologi canggih. Misalnya saja di Indonesia secara kebetulan ada IPTN yang sanggup menguasai dan mengembangkan teknologi dan menyejajarkan diri dengan negara-negara maju. Sebab penerapan teknologi canggih sangat dibutuhkan bagi pengembangan kualitas sumber daya manusia yang kondusif bagi pengembangan teknologi menuju peningkatan produktivitas yang semakin tinggi. Oleh karena itu, teori yang digunakan adalah

³⁰ Peter B. Heller, *Technology Transfer and Human Values*, Universitas Press of America, New York, 1985, hal. 1-2.

teori internalisasi dari sudut pemindahan / pengalihan teknologi canggih yang masuk pasar yang dilakukan oleh perusahaan asing dan nasional afiliasinya dilakukan secara intern.

Terminologi yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :
Istilah Hukum dalam penulisan ini tidak diidentifikasi dengan kepentingan individu melainkan untuk kepentingan masyarakat dan mengayomi masyarakat.

Pengalihan teknologi asing adalah suatu proses pengalihan dalam bentuk know-how, pengetahuan (*Knowledge*), pengalaman dan ketrampilan yang dibutuhkan untuk membuat (*manufacturing*) produk atau produk-produk dari pemilik teknologi kepada penerima teknologi. Joint Venture merupakan gabungan perusahaan asing dan perusahaan nasional yang beroperasi pada suatu negara secara organisatoris, managerial, financial, kontraktual ataupun strategis yang berpusat di perusahaan asing yang mempunyai induk perusahaan di negara asal. Pengalihan teknologi berkaitan erat dengan investasi asing dengan perusahaan asing atau secara individual -- perusahaan nasional dengan cara mendirikan sebuah perusahaan baru atau memperluas operasinya. Pengertian kontrak alih teknologi dalam penulisan ini adalah kontrak yang dibuat antara dua pengusaha, masing-masing individu atau sebagai wakil-wakil dari masing-masing perusahaannya dalam bidang perdagangan teknologi. Juga disini termasuk kontrak alih teknologi antara perusahaan asing dan perusahaan nasional.

Konsumen dalam penulisan ini adalah setiap orang yang memakai, menggunakan barang dan atau memanfaatkan jasa, bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan **tidak untuk diperdagangkan** (Pasal 1 butir 2 UUPK). Jadi konsumen itu adalah pemakai, pengguna barang dan atau pemanfaatan jasa tertentu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan **tidak** untuk tujuan memperdagangkannya kembali (tidak untuk tujuan komersial).

Produk konsumen dalam penulisan tercantum pada UUPK Pasal 1 butir 4 yang menetapkan bahwa barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen.

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui manajemen kontrak alih teknologi antara perusahaan asing dan perusahaan nasional
2. Mengetahui pelaksanaan kontrak alih teknologi terhadap penyimpangan kontrak alih teknologi yang merugikan konsumen.
3. Mengetahui usaha yang dilakukan Pemerintah dalam pengembangan teknologi dan Perusahaan dalam meningkatkan kemampuan penyerapan teknologi.

4. Mengetahui aspek hukum dan kemajuan teknologi dalam penciptaan iklim usaha yang sehat.

E. Kontribusi Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran tentang transfer of technology dalam manajemen kontrak alih teknologi antara pihak asing dan pihak Indonesia.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan pelaksanaan kontrak alih teknologi dan penyimpangannya yang merugikan konsumen
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan usaha pengembangan teknologi yang dilakukan oleh Pemerintah dan Perusahaan dalam meningkatkan kemampuan menyerap teknologi asing.
4. Penelitian ini diharapkan memberikan kejelasan terhadap aspek hukum dan kemajuan teknologi dalam penciptaan iklim usaha yang sehat.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis, maksudnya memberi gambaran tentang sesuatu atau gejala tertentu atau lebih dalam suatu kontrak alih teknologi diantara perusahaan asing dan perusahaan nasional.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *socio-legal research* yaitu untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti dan hasilnya dikaitkan dengan peraturan hukumnya dan melihat kehidupan yang senyatanya dalam masyarakat serta bagaimana hukum berinteraksi dengan lingkungan dimana hukum itu diberlakukan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah PT. Sepatu Bata Indonesia di Jakarta yang merupakan perusahaan yang paling cocok sebagai acuan bahwa pengalihan teknologi yang terjadi cukup rumit dengan kita menemukan agen alih teknologi yang telah mendesain ulang dan mengadaptasikan paket transfer alih teknologi guna meminimalkan persyaratan kemampuan menyerap yang dimiliki pihak nasional sebagai penerima teknologi dan pihak asing sebagai pemberi teknologi.

4. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer diperoleh dengan mengadakan penelitian lapangan : observasi, quisioner dan wawancara.
2. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, laporan penelitian dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk kualifikasi data primer, pengumpulan data dilakukan melalui 2 (dua) cara yakni pengamatan (*observasi*) dan wawancara (*interview*).

Pengamatan (*observasi*); dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yang tidak menyolok dan dilakukan tidak hanya dengan mencatat suatu kejadian atau peristiwa yang diamati, akan tetapi segala sesuatu yang diduga berkaitan dengan masalah yang diteliti. Karenanya observasi yang dilakukan selalu dikaitkan dengan dua hal penting, yaitu informasi dan konteks agar tidak kehilangan maknanya.³¹

Wawancara (*interview*) ; dilakukan secara tidak terarah (*non directive interview*) yang tidak berdasar pada sesuatu daftar pertanyaan yang sebelumnya telah disusun terlebih dahulu. Di sini peneliti tidak memberikan pengarahan-pengarahan tajam, akan tetapi terserah kepada informan yang diwawancarai untuk memberi penjelasan menurut kemauannya sendiri.³²

6. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dilakukan melalui teknik pemeriksaan triangulasi, khususnya **triangulasi sumber, informan dan metoda.**

³¹ S. Nasution, **Metode Penelitian Kualitatif**, Tarsito, Bandung, 1982, hal. 58.

³² Ronny Hanitijo Soemitro, **Op. Cit.**, 1988, hal. 60.

Patton dalam *Qualitative Data Analysis ; A Sourcebooks of New Methods*, sebagaimana dikutip oleh Lexi J. Moeloeng³³ menyebutkan bahwa triangulasi dengan *sumber* berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

Hal ini dapat dicapai dengan jalan :

- (1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
- (2) Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi;
- (3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
- (4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah / tinggi, orang berada, orang pemerintahan;
- (5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang terkait.

Dengan penggunaan triangulasi sumber ini diharapkan informasi yang diperoleh dapat di cross-check, sehingga akurasi dapat diuji.

Sedangkan triangulasi informan tersebut antara lain :

- Pakar ahli hukum : Departemen Kehakiman / MA
- Lembaga Ilmu Pengetahuan : LIPI, CIDES, UI

³³ Lexi J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1995, hal. 178.

- Staff ahli Menristek
- Para Pakar Teknologi
- Perusahaan Asing dan Perusahaan Nasional
- Unsur Konsumen dan YLKI

Triangulasi informan ini menggunakan cara *Show ball* (Bola Salju) yang artinya informan yang diwawancarai dengan tujuan tertentu menunjuk orang lain yang dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan.

7. Instrumen Penelitian

Peneliti adalah “key instrument” atau alat peneliti utama yang mengadakan sendiri pengamatan / wawancara tak berstruktur.

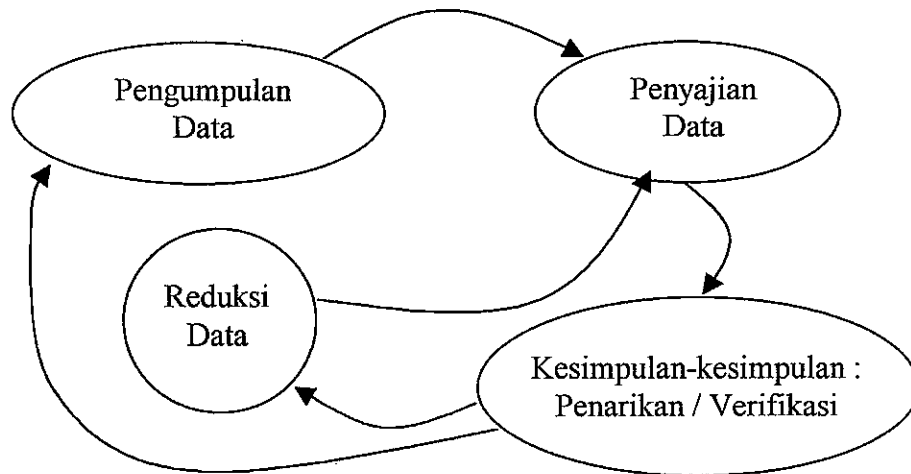
8. Analisis Data

Pengertian analisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis dan konsisten, dimana dilakukan penelaahan data yang lebih terperinci dan mendalam.

Dari data yang telah berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini, baik itu yang berupa data primer maupun data sekunder, dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

Metode analisis data dalam penelitian ini merupakan model interaktif yang meliputi empat tahapan kegiatan yaitu : tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, pengujian data, dan penarikan kesimpulan.

Proses tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



Dalam perspektif ini, keempat tahapan kegiatan analisis data itu sendiri merupakan suatu siklus yang interaktif, artinya analisis data ini merupakan upaya yang terus berlanjut dan berulang terus menerus bergerak dimana empat tahap kegiatan tersebut selama pengumpulan data.

Selanjutnya kegiatan tersebut bolak-balik diantara kegiatan reduksi, pengujian dan penarikan kesimpulan selama siswa waktu penelitian, sehingga masalah reduksi data, pengujian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berturut-turut sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul.³⁴

³⁴ M.B. Miles dan A.M. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, 1992, hal. 9.

9. Sistematika dan Pertanggungjawaban

Penulisan tesis ini tersusun secara berurutan dan masing-masing bab yakni terdiri dari lima bab seluruhnya saling terkait dan merupakan suatu kesatuan atau sistem yang utuh. Substansi penulisan tesis ini berusaha untuk mengungkapkan latar belakang pelaksanaan kontrak alih teknologi sebagai action tidak sesuai dengan penyimpangan kontrak alih teknologi sebagai substansinya kaitannya dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 / 1999 sehingga konsumen merasa tidak terlindungi (Pasal 3 huruf d UUPK). Hal ini terbukti bahwa dalam prakteknya arus teknologi memang berjalan sangat bebas dan tidak ada hambatan bagi masuknya teknologi pihak asing terhadap teknologi pihak nasional dan semua kontrak yang berkaitan dengan pengalihan teknologi asing dilindungi asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdara). Kontrak yang dibuat untuk melaksanakan alih teknologi digunakan sebagai dasar pelaksanaan alih teknologi didukung dengan adanya undang-undang dan pelaksanaannya serta mengatur hubungan para pihak secara kontraktual dengan memperhatikan bargaining position para pihak dilihat dari pengembangan kualitas sumber daya manusia didukung dengan kemampuan menyerap teknologi asing yang diperolehnya.

Penyajian penulisan tesis ini diawali dengan memaparkan latar belakang masalah berintikan mengenai penyebab dan arti pentingnya penelitian dilakukan kemudian diikuti oleh pendeskripsian tujuan dan

kontribusi penelitian. Bagi sebagian orang mengamati hukum yang hidup jauh lebih menarik bila dibandingkan dengan menelusuri peraturan-peraturan hukum secara normatif di dalam buku (*law in the books*). Kenyataan yang demikianlah yang melatarbelakangi diadakannya penelitian. Bagian pertama menjelaskan beberapa istilah dari judul pelaksanaan kontrak alih teknologi, antara perusahaan asing dan perusahaan nasional (*joint venture*) dan perlindungan konsumen. Konsep demikian dirasa perlu agar terdapat kesatuan pandang dalam memahami tulisan ini.

Beberapa permasalahan diselesaikan lewat paradigma definisi sosial yang memandang manusia sebagai orang yang aktif menciptakan kehidupan sosialnya sendiri, tidak memandang manusia sebagai individu yang statis dan terpaksa dalam bertindak, fokus perhatian paradigma ini terletak pada bagaimana caranya manusia mengartikan kehidupan sosialnya atau bagaimana caranya mereka membentuk kehidupan sosial yang nyata. Harapannya pelaksanaan kontrak alih teknologi antara perusahaan asing dan perusahaan nasional tidak ada penyimpangan isi kontrak yang telah diperjanjikan dan tidak akan terjadi bahwa isi kontrak ternyata tidak sesuai sehingga konsumen merasa tidak terlindungi. Sedangkan teori interaksionisme-simbolis bersumber dari aspek-aspek perilaku manusia yang subyektif dan interpretative, sehingga disini manusia tidak dilihat sebagai produk yang ditentukan oleh struktur atau situasi obyektif akan tetapi paling tidak sebagian merupakan aktor-aktor yang bebas dan perilaku manusia itu berdasarkan pada simbol-simbol yang

berdasarkan penelitian kesesuaiannya dengan tindakan atau perilaku dari manusia.

Pendekatan naturalistik dengan metode pendekatan *socio-legal research* atau yuridis sosiologis berusaha memahami perilaku manusia dari segi berpikir maupun bertindak dari orang-orang itu sendiri dan sangat menentukan bagaimana bekerjanya hukum itu serta bagaimana hukum berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya atau Bab kedua, Pelaksanaan Kontrak Alih Teknologi PT. Sepatu Bata Indonesia. Diawali dari pemaparan kasus atau masalah bagaimana dasar hukum pendiriannya, sistem manajemen produksi, pengendalian mutu serta pemasaran, bagaimana pula cara teknologi dialihkan dan teknologi bagaimanakah yang secara aktual dialihkan dan kasus kontrak yang terjadi antara Bata Ltd dengan PT. Sepatu Bata Indonesia. Bab ketiga, akan membahas Pelaksanaan Kontrak dan Dampak Yang Dirasakan Konsumen Akibat Peralihan Teknologi . Dalam hal ini timbulnya penyimpangan kontrak alih teknologi sangat merugikan konsumen. Kondisi demikian didasarkan pada Pasal 1320, 1338 KUHPerdara, UU PMA 1 / 1967, UU Perlindungan Konsumen 8 / 1999.

Bab Keempat, menguraikan Peningkatan Penguasaan Teknologi Dalam Rangka Melindungi Konsumen. Di sini memang akan dijelaskan tentang bagaimanakah peran pemerintah dalam mengembangkan teknologi melalui perijinan perusahaan atau industri yang beroperasi memiliki kapasitas berlebih sehingga berakibat kemerosotan kehidupan di bidang teknologi, selanjutnya

akan dibahas pula bagaimanakah usaha yang dilakukan perusahaan dalam meningkatkan kemampuan teknologi dikaitkan dengan aspek hukum karena tanpa adanya hukum yang mengaturnya akan mengakibatkan teknologi demi kemajuan teknologi dan penguasaan teknologi yang tepat guna dalam penciptaan iklim usaha yang sehat.

Bab Kelima, merupakan penutup dari serangkaian pokok bahasan secara keseluruhan yang berisikan simpulan dari segala sesuatu yang telah dibicarakan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu diberikan saran bagi perusahaan asing atau nasional terhadap upaya perlindungan konsumen sehingga konsumen merasa terlindungi kepentingannya.

BAB II

PELAKSANAAN KONTRAK ALIH TEKNOLOGI

DI PT. SEPATU BATA INDONESIA

A. Dasar Hukum Pendirian

Bata Ltd. Pindah dari Cekoslowakia setelah Perang Dunia ke-2. Kantor pusatnya sekarang berkedudukan di Toronto, Canada, (Lampiran) dan mengelola sistem di seluruh dunia dengan pabrik sepatu lebih dari lima puluh negara. Seperti terkandung dalam namanya Bata memproduksi alas kaki dengan merek-merek yang sudah terkenal seperti “Bata”, “Power”, “North Star”, Marie Claire”, “Mocassio” dan “Lolli Pops”. (Lampiran)

Bata Indonesia didirikan pada tanggal 15 Oktober 1931 di Jakarta sebelum kemerdekaan di bawah nama “N.V. Nederlandsch-Indonesiache Schoenhandel Maatschappij Bata”, dengan Akta No. 64 oleh Adrian Hendrick Van Ophuijsen, Notaris di Batavia, disahkan oleh Gubernur Jenderal Nederlands-Indies dengan Surat Keputusan No. 48 tanggal 26 November 1931 dan didaftarkan pada Raad Van Justitie Batavia No. 442, tanggal 30 November 1931 serta diumumkan dalam Lembaran Tambahan No. 235, Javasche Conrrent No. 104, tanggal 29 Desember 1931. Kemudian nama perusahaan diubah menjadi PT. Sepatu Bata dengan Akte Notaris Kartini Mulyadi, SH No. 119 pada tanggal 27 Januari 1982 dan disahkan

oleh Menteri Kehakiman, 1 Januari 1982. Perusahaan kini beroperasi berdasarkan kerangka hukum Penanaman Modal Asing Undang-Undang No. 1 Tahun 1967.

Komposisi awal pemilikan saham :

1)	Lagfin (Nederland) B.V. (Anggota Organisasi Bata Toronto, Canada)	7.800.000 saham	85 %
2)	Nasional Indonesia	1.200.000 saham	15 %
		9.000.000 saham	100 %

B. Sistem Manajemen

Organisasi perusahaan Bata di seluruh dunia menerapkan model *associated producer*, dimana produsen-produsen berasosiasi dibawah naungan perusahaan internasional. Sistem manajemen Bata dikelola, dikendalikan secara terpusat, namun paket alih teknologinya dapat diadaptasikan berdasarkan *franchising* dan sistem pengalihan dari perusahaan ke perusahaan lain. Model ini benar-benar merupakan suatu paket total pengalihan teknologi dengan bukti keberhasilannya baik secara internasional maupun intra-nasional.¹ Sistem pengalihan yang sangat terinci ini mencakup perangkat manajemen serta pedoman yang membawa suatu perusahaan kepada aktivitas lengkap mulai dari survai pasar, produk acuan dan desain sepatu, rencana

¹ Jack Baranson, *Technical Adjustment In Developing Economy : A Study in The Transfer Technology by An International Corporation*, Indian University , Bloomington 1965, Hal. 183. Baca juga, Kasus Keberhasilan Alih Teknologi di Amerika Latin, Meksiko dalam Pieter Kuhn, Hal. 232

produksi, tata letak pabrik, seleksi mesin dan peralatan, pengujian bahan dan prosedur pengendalian mutu, proses manufaktur, prosedur operasi dan warna-warnanya, pengawasan bahan, pembelian dan persediaan, serta suatu ragam lengkap pengendalian produksi dan keuangan.

Paket manajemen perusahaan terdiri atas sekitar 45 panduan teknis, manual dan prosedur standar. Manual-manual ini merupakan *designer-kids* untuk merancang program produksi. Diantara yang disediakan adalah :²

- Katalog bagi pembelian mesin standar dan rekayasa produksi
- Manual operasi dan pemeliharaan mesin
- Metode-metode pengujian bahan
- Pedoman formula karet / rubber

Selanjutnya paket standar atas kebijakan personalia perusahaan meliputi beberapa aspek rekrutmen tenaga kerja, pelatihan, serta manajemen termasuk prosedur seleksi dan testing bagi manajer personalia, kursus pelatihan penyesuaian sepatu (*shoe-fitting*), panduan peningkatan diri (*self improvement*) bagi manajer, prosedur rekrutmen, pedoman komunikasi bagi pembinaan hubungan dalam perusahaan, dan juga program pelatihan bagi calon manajer.

Disamping, itu ada lebih dari 25 panduan dan manual akuntansi, termasuk prosedur penyiapan rencana keuangan dan neraca (*balance sheet*) statistik,

² Hasil Wawancara Pada Bagian Personalia PT. Bata , tanggal 20 Maret 2001.

pedoman prosedur kas kecil (*petty cash*), skema pensiun, pencegahan penggelapan, pemasukan order (pesanan) penjualan, analisis kemampulabaan (*profitability*) atas penjualan para pengecer, statistik para pesaing, perencanaan pembelanjaan modal, tanggung jawab pemasok, persyaratan kredit dan sebagainya. Selain itu masih ada sekitar 17 pedoman administrasi dan manajemen lainnya yang meliputi pengendalian statistik, prosedur untuk kwitansi (*invoice*), pedagang eceran (*retailer*) dan penyalur (*wholesaler*) serta berbagai perangkat manajemen lainnya.

Akhirnya, ada sekitar 14 panduan komersial dan laporan berkala yang mencakup : arah perkembangan alas kaki (*footwear*), ide-ide perdagangan, prototype materi advertensi, panduan pembinaan toko pengecer dan penyalur, serta panduan pembuatan estimasi biaya pembeli-pembeli sepatu. Tampak disini Bata jelaslah melakukan pengalihan paket total terhadap teknologi yang dialihkan.

1. Produksi

Pabrik Sepatu Bata Indonesia berlokasi di Kalibata, Jakarta Selatan (Lampiran), dengan tiga pabrik terpisah, satu untuk sepatu karet dan pengujiannya, satu untuk sepatu kulit dan lainnya untuk sepatu plastik. Koleksi perusahaan sekarang terdiri dari lebih 1000 model (*style*) sepatu mulai dari tali kulit sederhana sampai model sepatu sport berkualitas tinggi dan berbagai tipe sandal serta mocassio buatan tangan.

Metode dan proses produksi bervariasi tergantung pada tipe alas kaki (sepatu) yang dibuat dan teknik-teknik baru secara terus-menerus diperkenalkan dengan sistem *Bata Shoe Organization / BSO*.

Kebijakan perusahaan dalam mendorong penggunaan bahan baku lokal, sekitarnya 75% bahan baku dijual secara di Indonesia. Sehingga sepatu-sepatu tersebut diproduksi berdasarkan standar kualitas yang cermat dan seksama.

2. Pengendalian Mutu

Pengendalian mutu adalah salah satu fungsi terpenting dalam produksi ; mutu produk tidak dapat diinspeksi pada akhir lini, tetapi harus dilaksanakan sepanjang jalan produksi. Dengan pengendalian mutu diharapkan dapat mengoreksi kualitas substandar yang mutlak diperlukan. Konsep pengendalian mutu Bata adalah **“Hanya bahan yang baik yang digunakan dan operasi dilakukan secara tepat”**. Bila cacat terjadi, cacat tadi dikoreksi pada saat terjadi, selama proses berlangsungnya produksi. Dalam sistem ini, para operator, operator kunci, pengawas mutu proses dan kepala regu (*foreman*), kesemuanya bekerja untuk menjamin bahwa bahan dan komponen bermutu baik akan kembali dalam bentuk produk akhir kelas satu melalui medium berupa kekaryaan (*workmanship*) yang berkualitas tinggi. Pengecekan kendali mutu dilakukan pada beberapa **“titik-titik pemeriksaan dalam proses produksi”** yang dilakukan oleh para operator kunci sedangkan pengawas mutu proses menggunakan

teknik sampling dalam melaksanakan tugasnya dengan mengambil contoh sepuluh pasang komponen atau 20 buah sepatu dan memeriksa cacat yang besar maupun kecil serta melakukan tindakan bila diperlukan.

Untuk itu, perusahaan menyediakan *training aids* dalam pengendalian mutu yang telah diuraikan diatas.

3. Pemasaran

Produk Bata alas kaki (*footwear*) didistribusikan ke seluruh Indonesia dengan jaringan 540 pengecer, dealer, depot dan penyalur independen tetapi eksklusif dan 1550 dealer non eksklusif.

- Program advertensi lokal dan nasional terpadu yang didesain untuk mencapai kesadaran tinggi atas produk dan Bata, mencapai kontinuitas iklan Bata, memproyeksi serta menanamkan citra perusahaan kepada konsumen.
- Menawarkan kepada setiap dealer toko (*showroom*) dan program efisiensi dengan memperkenalkan konsep mutakhir tentang display gaya internasional yang disesuaikan dengan lingkungan sekitar dan pelatihan (*training*) tenaga penjual yang cermat sehingga dapat pelanggan atau konsumen.

C. Cara Teknologi Dialihkan

Model atau cara pengalihan yang pokok pada alih teknologi ada 3 (tiga) corak yakni melalui *licensing* atau *franchising*, *Sub-contracting* dan *Equipment of Material Supplier*.

- ***Licensing* atau *franchising*.** Pengaturan pemberian lisensi (*licensing*) dan pemberian hak (*franchising*) bervariasi dari paket lengkap berupa instruksi-instruksi, bantuan teknis dan pelatihan, izin (*permission*) untuk membuat dan menjual produk tertentu dan seterusnya.
- ***Sub-contracting*.** Pemesanan bahan dan suku cadang (perusahaan induk) seringkali mau menyediakan keseluruhan informasi pendukung teknis dan pengetahuan manufaktur yang diperlukan, dan mereka dapat seefektif kontrak lisensi dalam hal pengalihan teknologi³, masalah ini akan kita bahas dalam kasus PT Bata dengan pemasok lokal alas kaki yang disebut kontraktor.
- ***Equipment of Materials Supplier*.** Berbagai layanan teknis disediakan oleh pemasok-pemasok peralatan, termasuk prosedur operasi dan perawatan (*maintenance*) dan bahkan pengetahuan pengolahan bahan. Contohnya, kita akan lihat pada PT Bata, pemasok bahan seringkali memiliki Departemen jasa teknis yang dapat memberikan informasi tentang tipe mesin yang digunakan, proses teknologi, spesifikasi dan

³ Jack Baranson, *Technical Adjustment In A developing In Economy : A Study In The Transfer Of Technology by An International Corporation*, Indiana University, Blooming, 1965, hal. 227

standar pengendalian mutu, prosedur pengujian produk dan bermacam-macam teknis lainnya.

Bata Ltd. (Canada) memakai model produsen-produsen yang berasosiasi (*associated producer*) dibawah naungan perusahaan Internasional. Alih teknologinya ke PT Sepatu Bata Indonesia berdasarkan *franchising*.

Sebuah *franchising* adalah suatu perusahaan bisnis independen yang mendapatkan hak tersebut dari *franchiser*.⁴ Akar dari konsep *franchise* adalah *licensi* yang mengijinkan seseorang atau menjual suatu produk atau jasa dibawah merk dagang atau nama perusahaan *licensor* yang merupakan unsure sentral dalam setiap hubungan *franchise*.

Oleh karena itu, perjanjian *franchise* pada umumnya disertai lisensi merk dagang dengan standar terinci tentang produk dan jasa, rencana pemasaran, kendali mutu, teknik komunikasi, dan berbagai preskripsi lainnya yang didesain untuk menstandarisasi produk dan jasa *franchiser*.

Pada umumnya *franchise* memberikan kompensasi kepada *franchiser* atas paket barang, jasa dan hak yang disediakan oleh *franchiser* pada awal dan selama hubungan berlangsung. Kompensasi tersebut dapat mengambil satu bentuk atau beberapa bentuk seperti pembayaran awal, royalty (berkesinambungan atau berkala) yang didasarkan pada presentasi penjualan atau metode perhitungan lainnya, pembayaran atas barang atau

⁴ John Adam dan Richard Jones, *Franchising*, Butterworth, London, 1986, hal. 7

jasa yang disediakan *franchiser* atau afiliasinya, pembayaran bantuan promosi, dan berbagai sarana lainnya.

D. Teknologi Yang Secara Actual Dialihkan

Waktu dan sumber daya yang diperlukan bagi alih teknologi dari perusahaan nasional ke perusahaan asing secara luas merupakan fungsi dari variabel-variabel yakni :

1. Kemampuan mengalihkan yang dimiliki perusahaan pemasok.

Kemampuan mengalihkan yang dimiliki pihak asing atas teknologi canggih yang dialihkan kepada penerima teknologi untuk dikembangkan di negara penerima teknologi yang beradaptasi dengan teknologi nasional – Indonesia.

2. Kemampuan menyerap yang dimiliki perusahaan penerima

Kemampuan menyerap yang dimiliki perusahaan penerima sangat tergantung pada dasar teknologi dan tingkat operasional perusahaan (ketrampilan teknis dan organisasi manajerial) dalam pengetahuan umum, spesifikasi sistem, dan spesifikasi perusahaan, yang relatif terhadap teknologi yang dialihkan dan terhadap kemampuan mengalihkan dari perusahaan pemasok yang menjadi tumpuan penting bagi efektifitas pengalihan teknologi. Motivasi pemasok tergantung pada model transfernya dan hasil potensial yang diharapkan oleh perusahaan pemasok khususnya keuntungan finansial⁵ dengan penetrasi pasar local dimana perusahaan beroperasi.

⁵ Intra-National Transfer Of Technology, Asian Productivity Organization, Tokyo, 1983, hal. 30

3. Kuantum dan Kerumitan Dari Teknologi Yang Dialihkan.

Kemampuan untuk mengalihkan teknologi Bata LTd terhadap PT. Sepatu Bata Indonesia bahwa teknologi yang dialihkan relatif rumit dibawah suatu model pengalihan teknologi *franchising*. Akan tetapi alih teknologi yang cukup rumit ini, disini kita akan menemukan *agen alih teknologi* yang sangat kuat yang secara cermat telah mendesain ulang dan mengadaptasikan paket transfer guna meminimalkan persyaratan kemampuan menyerap yang dimiliki oleh perusahaan penerima dan mempersempit kesenjangan antara perusahaan pemasok dan perusahaan penerima.

4. Model atau Cara Pengalihan Teknologi

Menurut Baranson⁶ cara atau model pengalihan yang pada pokoknya alih teknologi ada tiga corak yaitu :

Licensing atau franchising. Pengaturan pemberian lisensi (*licensing*) dan pemberian hak (*franchising*) bervariasi dari paket lengkap berupa instruksi-instruksi, bantuan teknis dan pelatihan, izin untuk membuat dan menjual produk tertentu dan seterusnya.

Sub-contracting. Pemesan bahan dan suku cadang (perusahaan induk) seringkali mau menyediakan keseluruhan informasi pendukung teknis dan pengetahuan manufaktur yang diperlukan dan mereka dapat seefektif

⁶ Jack Baranson, *Technical Adjustment in A Developing Economy : A Study in the Transfer Of Technology by An International Corporation* , Indiana University, Bloomington, 1965, hal 227

kontrak lisensi dalam hal pengalihan teknologi. Masalah ini akan dibahas dalam PT. Bata dengan pemasok lokal alas kaki yang disebut kontraktor.

Equipment of Materials Supplier. Berbagai layanan teknis disediakan oleh pemasok peralatan, termasuk prosedur operasi dan perawatan dan pengolahan bahan. Misal dalam PT. Sepatu Bata seringkali memiliki departemen jasa teknis yang memberikan informasi tentang tipe mesin yang digunakan, proses teknologi, spesifikasi dan standar pengendalian mutu, prosedur pengujian produk dan sebagainya.

5.Kesenjangan antara teknologi pemasok dan kemampuan menyerap perusahaan penerima.

Kesenjangan teknologi diakibatkan karena lebarnya kesenjangan, waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk menanamkan suatu paket teknologi tergantung pada perbedaan-perbedaan yang ada pada perusahaan tadi, dalam arti kesamaan, skala dan kecanggihan produk, kualitas bahan, penggunaan perkakas (*tolling*) dan servis pendukung teknisnya, standar-standar pengendalian mutu, dan tingkat relatif dari pengetahuan teknis “umum”, “spesifikasi-sistem” dan “spesifikasi-perusahaan”, yang semuanya ini berpusat pada kemampuan sumber daya tenaga kerja.

Dalam kasus PT. Sepatu Bata kita telah menemukan teknologi yang relatif rumit dibawah suatu model pengalihan teknologi *franchising*. Bata telah secara lengkap merencanakan desain-desain produk dan teknik-teknik produksi untuk memaksimalkan efisiensi penggunaan waktu dan sumber daya

pengalihan teknologi. Produknya sendiri didesain menurut selera pelanggan atau konsumen, sesuai bahan local yang tersedia, sedangkan teknik produksinya disesuaikan dengan skala yang diperlukan, pada gilirannya berkaitan erat dengan peralatan proses yang sesuai.

Bata menunjukkan bahwa efisiensi dari alih teknologi dapat secara signifikan diperbaiki melalui desain paket alih teknologi yang meminimalkan kesenjangan teknologi antara pemasok dan penerima.

a.manajemen

Sebagaimana telah diuraikan diatas, Bata Ltd. (Canada) dalam mengalihkan teknologinya menerapkan model *associated producer* berdasarkan *franchising* dalam suatu paket total pengalihan teknologi. Sistem pengalihannya sangat terinci dan cermat, termasuk peralatan dan petunjuk manajemen, yang melibatkan perusahaan ke dalam kegiatan lengkap dan menyeluruh dari mulai survei pasar, desain sepatu dan bauran produk (*product mix*), rencana produksi, tata letak pabrik, pemilihan produk.

b.Tenaga Kerja dan Pelatihan

PT. Bata Indonesia, sekarang ini mempunyai karyawan sekitar 5.600 orang. Perusahaan memberikan kesempatan pelatihan dan pengembangan bagi semua karyawan dan secara berkala perusahaan mengorganisasi baik *in house training* maupun *pelatihan eksternal*

dalam menjaga efektivitas karyawan guna mencapai tujuan perusahaan.

Kebijakan perusahaan dalam pengiriman tenaga kerja untuk mengikuti pendidikan, pelatihan dalam mengembangkan teknologi ke *National College of Rubber Technology* di London guna meningkatkan kemampuan personel sekaligus mempersempit kesenjangan kemampuan teknologi antara Bata Ltd. dan PT. Sepatu Bata Indonesia dalam usaha pengalihan ketrampilan dan alih teknologi yang lebih efektif dan efisien.

c. Riset dan Pengembangan

Semua bahan mentah itu kulit, plastik atau karet yang digunakan untuk memproduksi alas kaki (sepatu) Bata Indonesia disesuaikan dengan standar minimum *Bata Shoe Organization* / BSO dan pengujian atas produksi secara terus menerus dilakukan untuk memastikan tersebut tetap dipertahankan. (Lampiran)

Penggunaan bahan baku lokal lebih ditekankan dan bahan-bahan baru diuji secara akurat untuk kualitas “pakai” di laboratorium perusahaan dan departemen pengembangan produk sebelum memperkenalkan kepada konsumen.

Berdasarkan suatu *technical assistant agreement* dengan Bata Ltd. perusahaan Sepatu Bata juga disediakan bantuan teknis, komersial, administrative, personel dan pemrosesan data yang diperlukan dan

mempunyai akses terhadap fasilitas riset dan pengembangan alas kaki canggih dari *Bata Shoe Organization / BSO* di Canada.

Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa bila perusahaan induk terlalu banyak “menyuapi” akan mematikan daya kreatif dan inovatif perusahaan penerima, sedangkan memajukan perusahaan anak asuh pun membutuhkan kesinambungan bantuan yang diperlukan sehingga unit-unit kerja tadi dapat berdiri sendiri serta muncul sebagai unit yang mandiri. Inilah bukti nyata bahwa alih teknologi berhasil.

PT. Bata dapat dikatakan merupakan wahana riset, pengembangan dan **diseminasi teknologi** bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas pabrik kecil dan pengrajin sepatu sekaligus berperan menutup kesenjangan antara pihak asing dan pihak nasional melalui usaha penyebaran teknologi kepada sektor tradisional guna meningkatkan pemerataan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi.

Bentuk kegiatan diseminasi teknologi yang dilaksanakan PT. Sepatu Bata antara lain :

Pertama, melakukan alih teknologi melalui konsep bapak asuh dengan melakukan *subcontracting* kepada para kontraktornya. Model ini sama efektifnya dengan *franchising* seperti yang dilakukan Bata Ltd. (Canada) kepada PT. Sepatu Bata Indonesia.

Kedua, memberikan program pelatihan kepada kontraktor serta konsultasi berkaitan dengan pembuatan alas kaki yang disepakati

sehingga sesuai dengan spesifikasi mutu yang diminta oleh PT. Sepatu Bata, perusahaan menyerahkan contoh sepatu sebagai acuan pembuatan dan pada saatnya akan dikembalikan setelah kontraktor menguasainya.

E. Kontrak Bata Ltd. dengan PT. Sepatu Bata Indonesia

a. Trade Name and Trade Mark License Agreement

Mengenai hal ini, Bata Ltd. Toronto, Canada telah sepakat menyerahkan hak-hak sebagai berikut :

1. *The use of word and name "Bata" in the company's name.*
2. *The use of the "Bata" trade mark name in connection with its commercial activities in Indonesia.*
3. *The use of the "Bata" trade mark and other trade mark on footwear, hosiery, machinery, and associated products.*

Hak untuk menggunakan merk dagang *franchiser* merupakan salah satu karakteristik yang membedakan *franchising*. Oleh karena itu, semua elemen penting dari perjanjian atau kontrak *franchise* haruslah lisensi merk dagang. Provisi ini bukan saham berfungsi untuk menjamin hak *franchise* untuk menggunakan merk tertentu yang

diperjanjikan, tetapi juga fungsi hukum penting yang mencakup antara lain⁷ :

- (1) Pembatasan hak *franchise* untuk menggunakan merek tersebut.
- (2) Hak *franchiser* menggunakan sendiri merek tersebut atau melisensikannya kepada pihak lain untuk tujuan sama atau tujuan yang berbeda.
- (3) Hak *franchiser* untuk memodifikasi merek tersebut akibat masalah hukum atau misalnya perubahan dalam strategi perusahaan.
- (4) Tanggung jawab *franchiser* untuk menjamin *franchise* dari setiap tuntutan pelanggan.
- (5) Kewajiban *franchise* untuk bekerjasama mencegah pelanggaran orang lain atas penggunaan merek tersebut tanpa hak.

Elemen Kedua dari setiap hubungan *franchise* adalah *trade secret license* (lisensi rahasia dagang) yang merupakan bagian esensial dari sistem *franchise*. Dalam perjanjian kontrak antara Bata Ltd. dengan Bata Indonesia ini juga diatur, yang diperlihatkan nanti dalam provisi bantuan teknis (*technical assistant*) yang diuraikan di bawah ini. *Franchiser* akan menyerahkan informasi ini kepada franchisee pada awal dan selama hubungan berlangsung dan mengizinkan *franchise* untuk menggunakan informasi rahasia tersebut dalam hubungannya dengan operasi perusahaan. franchisee pada dasarnya tidak

⁷ John Adam dan Richard Jones, Op. Cit., hal. 9

diperkenankan mengungkapkan rahasia bisnis ini kepada pihak lain, juga tidak menggunakannya untuk tujuan lain kecuali yang ditetapkan dalam kontrak.

Selanjutnya, selain hak-hak diatas juga diberikan poteksi atau perlindungan teritorial terhadap pesaing merek dagang baru. Provisi ini menjamin *hak franchise* dan *lisensi* melaksanakan bisnis pada lokasi tertentu untuk menggunakan merek dagang dan nama perusahaan *franchiser*. Dan dinyatakan secara jelas bahwa merek dagang dan nama perusahaan adalah hak *franchiser* dan bahwa *franchise* hanya menggunakannya sebagaimana ditetapkan dalam kontrak.

b. Technical Assistant Agreement

Kontrak atau perjanjian *franchising* menuntut *franchiser* untuk memberikan jasa bantuan kepada *franchise* dalam kaitannya dengan pendirian dan operasi bisnis yang disepakati. Kewajiban *franchiser* dalam hal ini dapat dibagi dalam dua kategori :⁸

1. Bantuan awal sebelum bisnis beroperasi mencakup program latihan, pemilihan tempat, konstruksi standar dan spesifikasi, pemesanan dan pemasangan peralatan, sistem akuntansi standar,

⁸ John Adam dan Richard Jones, Loc. Cit, hal. 14

manual operasi dan sebagainya yang berhubungan dengan persiapan operasi.

2. Bantuan berkelanjutan selama hubungan berlangsung mencakup evaluasi dan inspeksi berkala, pelatihan karyawan, program pengembangan produk dan pemasaran, advertensi dan hubungan masyarakat serta bantuan operasi berkesinambungan, misalnya bantuan teknik dan konsultasi manajemen.

Berkaitan dengan bantuan teknis ini, kontrak Bata Ltd. dengan PT.

Bata Indonesia menyatakan bahwa Bata Ltd. telah menyetujui :

1. *To make available to the company advice on, among others, shoe productions methods, plant and machinery design and lay-out, management and marketing system, training and research and development.*(Perusahaan dapat memberi tahu bagaimana cara menghasilkan sepatu, rencana dan merancang perlengkapan dan rancangan, manajemen dan sistem marketing, pelatihan, riset dan pengembangan).
2. *To assist the company in there area of production, raw materials, procurement, personnel training, advertising and sales promotions.* (Perusahaan sebagai penghasil produk sepatu, bahan mentah, pelatihan tenaga kerja, iklan dan promosi penjualan).
3. *The provide information concerning world development in shoe design, fashion trends, new products and new production*

technique. (Memberikan informasi mengenai pengembangan bentuk atau pola sepatu, trend mode, produk baru dan teknik baru).

a. Pembayaran Royalty

Mengenai pembayaran yang harus dilakukan oleh *franchise* atau *license* biasanya tergantung pada kesepakatan para pihak yang terlibat dalam kontrak. Secara umum pembayaran *franchise* kepada *franchiser* dapat dikategorikan :

- Pembayaran awal (*initial fee*)
- Royalty
- Pembayaran lain secara terpisah

Pembayaran awal (*initial franchise fee*) kepada *franchiser* adalah pembayaran pada permulaan hubungan *franchise*. Pembayaran ini biasanya dapat dibayar dalam bentuk *lump sum*, cicilan dengan atau tanpa bunga selama jangka waktu tertentu. Pada umumnya jumlah ini tetap. Sementara royalty biasanya mengacu pada royalty atau service fee. Besarnya kerap ditentukan berdasarkan pendapatan operasi perusahaan. Dalam kaitan ini, misalnya PT. Bata Indonesia harus membayar Bata Ltd. *annual fee* sebesar 1,5% (*after applicable taxes*) dari pengembalian (pendapatan) bersih tahunan perusahaan (*of the company net annual turnover*) sebagai imbalan terhadap *technical assistance* yang diberikan Bata Ltd. seperti dipaparkan sebelumnya. Selanjutnya mengenai penggunaan

nama perusahaan dan merek dagang Bata Ltd. PT Bata Indonesia hingga kini tidak dibebankan biaya. Akan tetapi di kemudian hari seperti tertuang dalam kontraknya :

Currently the company receives these rights without charge, in the Bata Limited and the company will come to an agreement on proper compensation for the use of such rights. (Perusahaan menerima haknya tanpa tuntutan, di Bata Ltd. Perusahaan akan menyetujui kontrak dengan kompensasi sewajarnya).

b.Masalah Jangka Panjang

Beberapa kontrak lisensi didesain tidak terbatas atau untuk waktu yang tidak terbatas, tetapi juga banyak kontrak untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan pembaharuan. Jika tidak ditetapkan waktu tertentu maka pihak *licensor* sebagai pemilik merek dapat sewaktu-waktu mengakhiri hubungan ini dapat merugikan *licensee* yang telah mengeluarkan banyak biaya, waktu dan tenaga untuk memperkenalkan dan memasarkan merek tersebut di Indonesia. misalnya, pihak *licensor* memutuskan secara tiba-tiba kontrak dengan alasan bahwa *licensee* tidak berhasil memperbaiki mutu produk yang dianggap tidak memenuhi syarat atau standar yang telah ditetapkan.

Akan tetapi, pada kontrak lisensi dimana pihak *licensor* sekaligus merupakan investor sehingga pihak *licensee* merupakan subsidiary

company. Masalah jangka waktu tidak memenuhi kesulitan, karena kontrak akan terus berlangsung selama PT. PMA berdiri. Mengenai jangka waktu ini kontrak Bata Ltd dengan PT. Bata Indonesia menyatakan :

This agreement applies for a periode of fifteen years from 17th December, and there after continues without limit of time subject to thirty six months notice of termination in writing by either party.

(Kontrak ini diterapkan untuk jangka waktu 15 tahun terhitung sejak tanggal 17 Desember, setelah itu berlanjut tanpa batas waktu dengan tenggang waktu selama 36 bulan sampai diperbaruinya kontrak tersebut oleh perusahaan yang lain).

F. Kontrak PT. Sepatu Bata dengan Kontraktor

PT. Sepatu Bata Indonesia membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pabrikan kecil atau usaha pengrajin sepatu menjadi kontraktor perusahaan dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak yang terlibat. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana tertuang dalam kontrak antara PT. Sepatu Bata dengan Kontraktor / pihak asing :

1. Spesifikasi mutu alas kaki ditentukan oleh PT. Sepatu Bata.
2. Menyerahkan alas kaki pada jadwal berdasarkan harga-harga yang telah disetujui.

3. Tidak akan membuat atau mengirim alas kaki kepada langganan lain baik di Indonesia maupun di luar negeri, dengan memakai model sama atau dengan alas kaki yang dibuat dan dikirim oleh kontraktor kepada PT. Bata.
4. Tidak akan memakai kata “Bata” atau sesuatu dari merek atau merek dagang Bata pada alas kaki yang dibuat kontraktor untuk langganan lain.
5. Memberikan wewenang yang perlu kepada wakil perusahaan Bata untuk memeriksa bengkel kerja serta alat-alat pembuatannya setiap waktu dan untuk memeriksa alas kaki selama dalam proses pembuatan dan tersimpan dalam gudang kontraktor untuk menjamin diikutinya spesifikasi mutu Bata maupun untuk memberikan kesempatan kepada Bata untuk meyakinkan sendiri bahwa alas kaki tersebut tidak oleh kontraktor langganan lain.
6. Menjamin sepenuhnya untuk pekerjaan dan mengganti sepatu yang ditolak oleh Bata karena dibawah spesifikasi mutu yang diperlukan dan disetujui.
7. Menerima pengaduan pelanggan / konsumen atas sepatu yang cacat dan mengganti perusahaan Bata dengan nilai pengaduan.
8. Mengganti kerugian kepada perusahaan Bata dengan membayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai ganti rugi, bila kontraktor melakukan pelanggaran terhadap salah satu dari isi kontrak yang telah disepakati.

Dari beberapa uraian yang dipaparkan diatas, tampak jelas bahwa PT. Sepatu Bata Indonesia menuntut setiap kontraktor untuk memenuhi standar spesifikasi mutu dan jadwal ketat perusahaan yang disertai dengan sanksi. Ini cukup alasan karena bagaimanapun Bata harus tetap menjaga mutu mereka, yang telah memiliki predikat internasional. Oleh karena itu, maka sebelum dan sesudah kontrak ditandatangani, Bata secara terus menerus mengikuti setiap kontraktornya melalui pemeriksaan bengkel kerja, cara kerja, peralatan yang digunakan dan sebagainya. Tidak jarang Bata menyerahkan atau mengirimkan contoh-contoh sepatu sebagai acuan pembuatan para kontraktor. Juga sekali setahun mengundang para kontraktor untuk mendapatkan pengarahan dan pelatihan dari Bata untuk kelancaran dan meningkatkan pengetahuan para kontraktor tersebut.

G. Anak Asuh PT. Bata Indonesia

Peranan PT. Bata Indonesia dalam riset dan pengembangan serta diseminasi (penyebaran) teknologi dan ketrampilan terhadap usaha-usaha kecil dan pengrajin sepatu di seluruh Indonesia.

PT. Bata Indonesia sebagai badan usaha milik swasta telah melakukannya. PT. Bata Indonesia yang memiliki laboratorium pengujian alas kaki (*footwear*) telah lama melaksanakan fungsi Bapak Asuh terhadap usaha-usaha pabrik kecil dan pengrajin (*home industry*) sepatu di Indonesia. Dalam melakukan perannya sebagai Bapak Asuh terhadap pabrik kecil,

PT. Bata dapat dikatakan merupakan wahana riset, pengembangan dan diseminasi teknologi bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas pabrikan kecil dan pengrajin sepatu sekaligus berperan menutup kesenjangan antara sektor modern dan sektor terbelakang melalui usaha penyebaran teknologi kepada sektor tradisional guna meningkatkan pemerataan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi.

Sebagai perusahaan multinasional, PT. Bata Indonesia dapat melakukan peran ini, karena ia mempunyai akses informasi mutakhir terhadap trend sepatu dunia, melalui *Bata Shoe Organization* termasuk Bata Ltd yang menjadi induknya.(Lampiran)

Model anak asuh dilakukan PT. Sepatu Bata dengan pabrikan kecil dan pengrajin, merupakan mekanisme pengalihan teknologi yang efektif, efisien dan praktis. Hasilnya para pabrikan dan para pengrajin yang dulu bekerja secara tradisional telah diangkat dan berkembang ke arah usaha produktif dan modern. Mereka tidak saja telah memperoleh ketrampilan dan pengetahuan akan pembuatan sepatu, lebih dari itu banyak dari mereka sekarang telah dapat berdiri sendiri sebagai anak asuh yang dibina dan dibimbing PT. Sepatu Bata dan mereka tidak sulit lagi memasarkan sepatu-sepatu buatan mereka, karena PT. Bata sendiri menjadi pembelinya dan memasarkan produk-produk tersebut ke seluruh pelosok nusantara melalui distributor dan toko-toko dan pengecer Bata.

Dari perannya sebagai wahana riset, pengembangan dan diseminasi teknologi, maka peran lain yang dapat dan telah dilakukan PT. Sepatu Bata adalah peran yang mempunyai dampak multiplikasi yang luas.

BAB III

PELAKSANAAN KONTRAK DAN DAMPAK YANG DIRASAKAN KONSUMEN AKIBAT PERALIHAN TEKNOLOGI

A. Analisa Kontrak

Istilah kontrak atau perjanjian berasal dari bahasa Belanda “*overeenkomst*” sering disamakan dengan istilah “**Perikatan**” (*Verbinten*is). Sebenarnya perikatan adalah isi perjanjian artinya bahwa setiap perjanjian terdapat beberapa perikatan. Pembuat Undang-Undang dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mencoba memberikan perumusan tentang apa itu perikatan. Sementara itu penggunaan kata perikatan sebagai terjemahan dari kata *verbinten*is belum merata. Sebagian sarjana masih ada yang menterjemahkan menjadi “**Perutangan**”.¹ Malahan ada yang menterjemahkan menjadi “**Persetujuan**”.²

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata yang dimaksudkan perjanjian / persetujuan/kontrak adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih. Misalnya dalam perjanjian kontrak alih teknologi, pihak pemberi teknologi mengalihkan teknologinya kepada pihak pembeli/penerima teknologi dengan bentuk *technical assistant agreement* sebagai sarana untuk melangsungkan pertukaran akan produk teknologi dan menjamin akan adanya cacat produk tersembunyi. Pertukaran

¹ Disunting dari Buku *Hukum Perutangan*, Seksi Hukum Perdata, Fakultas Hukum UGM, 1980.

² J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, 1992, hal.1.

terikat apabila mengadakan negosiasi yang mengarah pada suatu persetujuan / agreement agar terbangun jaringan pemasaran yang solid dalam hubungan bisnis tersebut. Perkataan “perbuatan” dalam pasal 1313 KUH Perdata tersebut oleh para ahli hukum diartikan sebagai **“perbuatan hukum”**, karena hubungan tercipta dari perjanjian/kontrak itu adalah **“hubungan hukum”** (*Rechtbetreking*), sedangkan perkataan “mengakibatkan dirinya” yang memberi kesan bahwa perjanjian/kontrak itu hanya sepihak diterjemahkan juga dengan **“saling mengikatkan dirinya”**, karena disamping ada perjanjian sepihak ada juga perjanjian yang bersifat timbal balik.

Perlu diingat bahwa perikatan merupakan suatu pengertian hukum (*Rechtsbegrip*), dan karenanya tidak ada wujudnya, sedangkan yang nampak, kalau ia berupa suatu perjanjian tertulis adalah perjanjiannya.³ Adapun keterikatan para pihak yang tidak dengan perjanjian tertulis dinamakan **“keterikatan non hukum”**.⁴

Perjanjian/kontrak merupakan sarana yang dijadikan dasar untuk melaksanakan pertukaran seperti telah dikemukakan diatas. Dalam suatu kontrak terdapat dua unsur yakni : 1) perencanaan transaksi secara rasional dan 2) penentuan sanksi hukum yang akan digunakan untuk memaksakan pelaksanaan transaksi tersebut.⁵ Dengan perkataan lain, jika suatu hubungan bisnis tidak diatur

³ J. Satrio, Ibid, hal.6.

⁴ Fuady, Munir, *Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, 1994, hal.237.

⁵ Soemitro, Ronny Hanintyo, *Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, Agung Press, 1989, hal.19.

dengan perjanjian, maka para pihak akan mengalami kesulitan jika terjadi sengketa diantara mereka. Sengketa cenderung dilaksanakan dengan cara berunding berdasarkan prinsip *take and give* dalam dunia bisnis, bahkan sering tanpa perantara jasa pengacara.⁶ Namun dalam manifestasinya, dalam pelaksanaannya cenderung berbeda dan tidak saling mendukung.

1. Syarat-syarat kontrak dan tujuan kontrak

Agar suatu kontrak oleh hukum dianggap sah sehingga mengikat kedua belah pihak maka kontrak tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Syarat Umum

1) Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata

- Kesepakatan kehendak
- Wenang berbuat
- Perihal tertentu
- Kausa yang legal

2) Di luar Pasal 1338 dan 1339 KUH Perdata

- Itikad yang baik
- Sesuai dengan kebiasaan
- Sesuai dengan kepatutan
- Sesuai dengan kepentingan umum

⁶ Macauly, Stewart, *Non Contractual Relations in Business*, American Sociological Review, hal.55-67

- **Syarat Khusus**

- Tertulis
- Akta notaris
- Akta pejabat tertentu / bukan notaris
- Ijin dari yang berwenang

Dalam penelitian ini, **kesepakatan kehendak** merupakan salah satu syarat sahnya suatu kontrak alih teknologi yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata bersama-sama dengan syarat kewenangan berbuat merupakan syarat subyektif kontrak, maka apabila kedua syarat tersebut tidak terpenuhi akan berakibat bahwa kontrak yang bersangkutan “dapat dibatalkan” tapi bukan “batal demi hukum”. Suatu kesepakatan kehendak terhadap suatu kontrak dimulai dari adanya kontrak yang diadakan oleh para pihak dalam pengalihan teknologi, yang diikuti oleh penerimaan teknologi/pembelian teknologi dalam hal ini produk teknologi oleh salah satu pihak, di lain pihak oleh pemberi teknologi yang menginginkan adaptasi akan teknologi yang dialihkannya, sehingga akhirnya terjadilah kontrak.

Teori Kepercayaan merupakan pernyataan obyektif yang dapat dipercaya. Sony Keraf dalam bukunya “Etika Bisnis” mengatakan kepercayaan terkait erat dengan “kejujuran”. Dapat dikatakan bahwa orang dapat percaya adalah orang jujur.⁷

⁷ Sony Keraf, *Etika Bisnis*, Kanisius, 1998, hal.79.

Pertama, kejujuran relevan dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian / kontrak. Dalam mengikat perjanjian/kontrak tertentu, semua pihak secara apriori saling percaya satu sama lain. Seandainya salah satu pihak berlaku curang dalam syarat-syarat perjanjian tersebut, maka pihak yang dicurangi tidak mungkin lagi mau menjalin bisnis dengan pihak yang berlaku curang tersebut.

Kedua, kejujuran juga relevan dalam penawaran barang/produk dengan kualitas mutu produk dan harga yang sebanding dengan mutu yang dihasilkan oleh produk teknologi tersebut. Artinya apabila perusahaan / pengusaha menipu konsumen, konsumen akan mudah lari ke produk lain sesuai dengan kehendak mereka.

Ketiga, kejujuran relevan dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan. Suatu perusahaan akan hancur kalau suasana kerja penuh dengan tipu muslihat atau cenderung akal-akalan akan berakibat kejujuran dalam perusahaan sulit untuk terbina sehingga untuk menjalin hubungan dengan relasi bisnis sulit untuk dijalankan padahal hal ini sangat merugikan perusahaan dalam memperoleh pemasokan teknologi canggih yang akan diproduksinya melalui produk teknologi yang akan dipasarkan kepada konsumen.

Faktor-faktor yang mendukung tumbuhnya kepercayaan pihak nasional dalam kontrak alih teknologi dengan pihak asing adalah :

- Bonafiditas/nama baik perusahaan melalui **ajang pameran bisnis**, apakah kedua belah pihak dapat melihat apakah perusahaan asing atau nasional cukup bonafid ataukah tidak dalam menghasilkan, memasarkan produk sudah sesuaikah dengan kualitas mutu yang dihasilkan sebagai ukuran menilai *bonafiditas* perusahaan tersebut.
- Keterbukaan dalam negosiasi melalui pemasaran produk teknologi dengan melakukan *negosiasi secara transparan* dan memperkuat rasa saling percaya diantara para pihak. Adapun yang menjadi subyek negosiasi antara lain mengenai mutu produk, dan harga produk yang dihasilkan menggunakan padat modal dengan teknologi canggih sehingga dapat memperoleh keuntungan yang besar dengan menekan modal seminim mungkin.

Meskipun demikian, kepercayaan dalam bisnis banyak disimpangi sehingga hubungan bisnis yang sudah dibangun dapat berakhir dan sulit untuk dibangun kembali. Dalam transaksi bisnis antara perusahaan nasional dan perusahaan asing terjadi interaksi antara **pertukaran sosial daripada pertukaran ekonomi**. Menurut *Blau* “untuk melakukan pertukaran sosial tidak diharuskan untuk melakukan atau melaksanakan suatu kewajiban tertentu, sehingga merupakan **suatu harapan** untuk melaksanakan kontrak dalam rangka melindungi konsumen. Sedangkan pertukaran ekonomi selalu berpijak pada

kontrak resmi yang berkewajiban terhadap produk pada waktu yang telah ditentukan sehingga merupakan **suatu kewajiban**.⁸

Tujuan kontrak⁹ dalam bisnis para pihak tersebut untuk mengamankan transaksi yang diadakan oleh kedua belah pihak. Tidak dapat disangkal bahwa hubungan bisnis dimulai dari kontrak yang mereka buat. Tanpa adanya kontrak tidak mungkin hubungan bisnis dilakukan. Kontrak dapat dilaksanakan baik secara lisan maupun tertulis. Bahkan dalam *Convention on International Sale of Goods* tahun 1980 kontrak secara lisan juga diakui. Akan tetapi mengingat bahwa tujuan kontrak adalah untuk mengamankan transaksi bisnis, jika kontrak tersebut secara lisan dapat dipandang para pihak aman karena integritas masing-masing pihak memang dapat dijamin, mereka tidak perlu membuat kontrak tertulis. Hanya apabila pihak ketiga keberatan dengan kontrak itu dan menentanginya kedua belah pihak harus membuktikan adanya kontrak itu dengan bukti lainnya.

2. Norma kontrak

Pada prinsipnya, para pihak dalam suatu kontrak bebas mengatur sendiri kontrak tersebut sesuai dengan asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH

⁸ Padgorecki, Adam, Whelan Christoper J., *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, dialihbahasakan oleh Rnc. Widyarningsih dan G. Kertasaputra, Bina Aksara, 1987, hal.220.

⁹ Kontrak di dalam Hukum Indonesia, yaitu *Burgelijk Wetboek* disebut *overeenkomst* atau dalam bahasa Indonesia perjanjian. Tetapi cenderung merujuk kepada suatu pemikiran akan adanya keuntungan komersial yang diperoleh kedua belah pihak. Sedangkan perjanjian dapat saja berarti *social agreement* yang tentu menguntungkan kedua belah pihak secara komersial.

Perdata. Pasal 1338 ayat 1 tersebut menentukan bahwa semua kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Asas tersebut berarti bahwa para pihak bebas membuat kontrak dan mengatur sendiri isi kontrak tersebut sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Memenuhi syarat sebagai suatu kontrak
- Tidak dilarang oleh undang-undang
- Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku
- Sepanjang kontrak itu dilaksanakan dengan itikad yang baik

Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam praktek bisnis yang amat bebas sebagai landasan bagi para pihak dalam melakukan kegiatan bisnis yang dapat menimbulkan gangguan , kerugian terhadap ketertiban, kepentingan umum dalam prakteknya antara lain diwujudkan dalam berbagai jenis kontrak tergolong ke dalam kelompok bisnis yang merugikan / *restrictive business practices* dapat dijadikan pertimbangan dan asas-asas hukum relevan bersumber pada Pancasila dan UUD 1945.

Dalam asas “Kebebasan Berkontrak” para pihak yang berkontrak diwajibkan memegang janji mereka untuk melaksanakan kontrak di kemudian hari dalam hampir semua kasus-kasus kontrak karena tujuan utama kontrak adalah membolehkan para pihak menentukan dengan perjanjian bersama siapa saja yang harus menanggung resiko dan biaya tertentu terlepas dari situasi apa yang terjadi dikemudian hari. Hubungan ini dibatasi oleh *Droit Economique* yang merupakan peraturan-peraturan hukum administrasi negara yang

membatasi kebebasan berkontrak demi pemerataan, keadilan dan kesejahteraan bangsa (Sunarjati Hartono, 1991:2). Kebebasan berkontrak di Amerika Serikat pun tidak tanpa batas (Erman Rajagukguk, 1993 : 16). Sehingga dapatlah dikatakan bahwa pembatasan asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip yang universal yang mengikat asas kebebasan berkontrak itu sendiri, walau macam pembatasannya berbeda menurut masing-masing latar belakang masing-masing negara. Misal di Indonesia, pembatasannya ada dalam Pasal 1320, Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUH Perdata seperti diatas telah disebutkan. Pembatasan tersebut diharuskan oleh undang-undang, kepututan serta adanya itikad yang baik sehingga merupakan salah satu sendi dari nilai-nilai etis yang menjadi pedoman para pihak dalam berbisnis.

Demikian pula Keseimbangan hak para pihak dalam mengadakan kontrak sah dan mengikat apabila tercapai **kata sepakat** dan mempunyai **akibat hukum**, sehingga mulai saat itu juga sudah timbul hak dan kewajiban diantara para pihak dengan menganut asas *pacta sunt servanda* (janji itu mengikat) dimana suatu kontrak berlaku seperti undang-undang bagi para pihak (Pasal 1338 KUH Perdata).

Menurut **Hans Kelsen** asas *Pacta Sunt Servanda* sebagai dasar bagi suatu tatanan hukum Internasional.¹⁰ Dalam jangkauan jauh, hal tersebut merupakan upaya untuk mencoba mengakui teori janji fiksi belaka, walaupun dalam

¹⁰ Purbacaraka Purnadi, Ali Chidir M, *Disiplin Hukum*, Alumni, Bandung, 1981, hal.73.

jangkauan dekat masalah berkisar pada janji-janji yang sebenarnya dalam kontrak antara para pihak. Karena janji akan bersasaran pada suatu ikatan terhadap pelaksanaan kontrak alih teknologi, mau tidak mau kita harus memandang kedudukan sebuah janji kontrak sebagai sebuah “nilai” dengan keterikatan sehingga dapat dilaksanakan pemenuhannya agar dapat tercapai keberhasilan akan produk teknologi bagi perkembangan bisnis para pihak yang mengacu pada pelaksanaan kontrak alih teknologi dalam rangka melindungi konsumen.

Oleh karena itu, agar dalam alih teknologi terdapat kebebasan untuk memilih nilai-nilai yang menjadi motivasi pendorong dan pembentuk sikap, sebab teknologi berkaitan erat dengan budaya. Jadi dalam mengadopsi suatu teknologi tidak terlepas dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti unsur budaya teknologi modern misalnya : nilai-nilai, rasionalitas, ketelitian, ketekunan, disiplin dan efisiensi harus turut diambil alih. Dengan analogi yang sederhana dapat dirumuskan : *Bagaimana secara selektif mencangkok nilai budaya baru melalui alih teknologi agar mendukung nilai budaya kita sendiri.*

Perencanaan alih teknologi didasarkan pada teori fungsional dengan alih teknologi maka kegiatan alih teknologi sebagian besar dilakukan oleh “teknostuktur” yaitu orang. Orang-orang yang terlibat dalam menerapkan semua pengetahuan ilmiah ke dalam proses pemecahan masalah-masalah sosial. (Galbraith, 1983, hal.60).

B. Faktor-faktor Non Hukum Dalam Proses Pembuatan Kontrak

Mengenai penyiapan kontrak, sebagian besar ahli hukum menganjurkan adanya negosiasi sebelum masuk dalam pembuatan kontrak. Anjuran demikian memang tidaklah salah akan tetapi di alam praktek tidak selalu demikian. Didalam kontrak, pihak yang memiliki posisi yang lebih kuat yang merancang kontrak sedangkan pihak yang lemah lebih dihadapkan kepada situasi *take it or leave it*. Proses demikian ini memang sangatlah efisien, tetapi perlu diingat bilamana terjadi ketidakjelasan ahli hukum dari pihak yang tidak menyiapkan *draft* kontrak tersebut bahkan akan tidak mungkin pihak tersebut terjebak ke dalam klausula-klausula yang memang “dirancang” untuk merugikan pihaknya atau tidak menguntungkan pihak perancang *draft* kontrak tersebut. Lebih-lebih kalau dalam negosiasi itu pihak yang tidak menyiapkan *draft* tidak didampingi oleh ahli hukum, kemungkinan pihak itu masuk ke dalam jebakan kontrak lebih besar lagi. Untuk menghindari hal tersebut maka para pihak dalam mengadakan kontrak haruslah menggunakan ahli hukum untuk mempersiapkan pembuatan kontrak dalam *draft* kontrak yang telah disepakati meskipun dengan biaya tersendiri karena kemungkinan akan adanya kerugian yang besar di belakang hari dapat saja terjadi dalam mengadakan kontrak.

Dalam mempersiapkan kontrak perlu diingat dua prinsip dalam hukum kontrak (i) *beginselen der contracttsbrijheid* atau apa yang disebut sebagai *party*

*autonomy*¹¹ yaitu para pihak bebas untuk memperjanjikan apa yang mereka inginkan (tentunya harus sesuai dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum) dan (ii) *pacta sunt servanda* yaitu sama sekali sepakat, kontrak itu berlaku mengikat sebagaimana undang-undang.

Jika kontrak telah ditandatangani para pihak yang terikat untuk melaksanakan prestasi dan kontra prestasinya. Apabila kedua belah pihak melaksanakan seperti apa yang tertuang dalam isi kontrak, kontrak itu telah dianggap selesai. Namun karena kontrak bertujuan untuk **mengamankan transaksi**, jika salah satu tidak melakukan kewajibannya dan menimbulkan sengketa maka diperlukan adanya penyelesaian sengketa yang disepakati dalam kontrak dengan kemungkinan adanya daya fleksibilitas kontrak dalam jangka panjang sehingga dapat beradaptasi dengan situasi dan mengalami perubahan tanpa harus melakukan **negosiasi**. Oleh karena itulah dalam penuangan klausula kontrak mengenai penyelesaian sengketa sudah barang tentu haruslah mengingat pada undang-undang yang berlaku dan klausula *force majeure* atas daya fleksibilitas kontrak yang beradaptasi tersebut.

Pihak yang mengadakan kontrak dalam penelitian ini cenderung menimbulkan adanya perbedaan persepsi mengenai isi kontrak dalam mana pihak yang satu ingkar janji atau wanprestasi (*default*). Menurut Hukum Indonesia wanprestasi terjadi apabila pihak yang harus melakukan prestasi tidak melakukan

¹¹ Di dalam kontrak yang bersifat Internasional lazim digunakan istilah *party autonomy*.

prestasi sama sekali, melakukan prestasi tetapi tidak seperti yang diperjanjikan, atau prestasi terlambat dalam bisnis yang telah disepakati dan mengubah isi kontrak secara sepihak dan pihak yang lain merasa dirugikan. Dengan kata lain, kontrak bisnis dan praktek bisnis demikian sangatlah merugikan pihak-pihak yang secara langsung berhubungan dengan praktek tersebut, masyarakat hukum dalam hal ini konsumen produk teknologi dan para pihak seperti telah disebutkan diatas. Faktor-faktor non hukum yang sangat berpengaruh sebagai berikut :

1. Kualitas sumber daya manusia

Sebuah organisasi / perusahaan dalam mewujudkan eksistensinya dalam rangka mencapai tujuan bisnisnya, memerlukan sejumlah pekerja yang mampu melaksanakan volume kerjanya. Untuk itu diperlukan perencanaan SDM dengan berorientasi pada hasil analisis pekerjaan yang harus dilaksanakan secara profesional baik dari segi kualitatif/kuantitatif karena sangat berpengaruh besar terhadap sukses atau gagalnya perusahaan dalam mewujudkan eksistensinya yang bersifat kompetitif bisnis baik di masa sekarang dan masa yang akan datang. Menurut *Arthur W. Sherman dan George W. Bohlander* perencanaan merupakan proses mengantisipasi dan membuat ketentuan (persyaratan) untuk mengatur arus gerakan tenaga kerja ke dalam, di dalam dan keluar organisasi/perusahaan. Dengan perencanaan yang tepat dan akurat dalam menyongsong era globalisasi ekonomi, akan tampak pada penilaian terhadap sikap dan perilaku karyawan/karyawati perusahaan secara proporsional dalam mengendalikan aktivitas perusahaan

yang memiliki *knowledge, ability, skill* yang tinggi sebagai faktor yang menentukan keberhasilan perusahaan, antara lain : kualitas kehidupan kerja, moral karyawan/karyawati, tanggung jawab sosial dan etika bisnis dengan memperhatikan prinsip keadilan secara internal perusahaan.

Manfaat yang diperoleh dalam pengintegrasian perencanaan SDM strategis dan operasional bisnis suatu perusahaan adalah meningkatkan sistem informasi SDM dalam mendayagunakan SDM secara efektif dan efisien bagi pencapaian tujuan perusahaan; meningkatkan pendayagunaan SDM untuk memperoleh peluang dalam memberikan kontribusi pencapaian tujuan perusahaan; menyelaraskan aktivitas SDM dengan sasaran organisasi perusahaan secara lebih efisien dan efektif dalam volume kerja perusahaan.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh *De Crane Gary* yang menyatakan bahwa konsep globalisasi adalah orang, maka untuk keluar sebagai pemenang di era globalisasi ekonomi maka pengelolaan terhadap sumber daya manusia merupakan kunci utama kesuksesan suatu perusahaan yang memang sebagian perusahaan kesuksesannya tergantung pada kesuksesan manajemen sumber daya manusianya.

Dalam dunia bisnis, pengembangan usaha memang sangat ditentukan oleh keberhasilan mengembangkan sumber daya alam, teknologi dan manusia. Agar pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam dan teknologi dapat semakin meningkat maka diperlukan pembinaan atau pengembangan sumber daya manusia terarah dan berkesinambungan melalui pengembangan motivasi

dan peningkatan kemampuan atau kecakapan. Menurut *Teori Higiene-Motivasi Herzberg* (*Herzberg's Hygiene-Motivation Theory*) yang menyatakan orang memberikan respon pada harapan yang tinggi yang menghasilkan kinerja yang tinggi yang akan memperkuat harapan yang lebih tinggi dan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi dan dapat menimbulkan kepuasan terhadap produk yang dihasilkan, tanggung jawab pada perusahaan, prospek dalam pencapaian tujuan/sasaran perusahaan.

Menurut *Boskin and Lau*¹² peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan endogenitas dari laju kemajuan teknologi lokal yang menampakkan kecenderungan yang mencolok dalam laju perkembangan input dan augmentasi modal disebabkan semakin mengecilnya elastisitas produksi terhadap barang modal diikuti oleh kemajuan teknologi. Sehingga dalam hubungan ini, teknologi mesti dipandang : *bagaimana mengkombinasikan berbagai input produktif dalam proses produksi dengan menggunakan teknik produksi tertentu secara efisien untuk menghasilkan output dengan kualitas yang semakin membaik dan yang dapat dipasarkan*. Untuk itu, keberhasilan dalam pengembangan sumber daya manusia ini ditunjang oleh peningkatan kapabilitas teknologi untuk memperkuat daya saing dengan pendekatan

¹² Pasay A. Haidy N, Putra Gatot Arya dan Nazara Suahasil, Makalah *Produktivitas, Sumber Daya dan Teknologi*, hal.20.

pasar global sehingga daya saing bisa lebih terpacu dengan lebih mengandalkan prinsip kemandirian dalam pencapaian teknologi.

2. Ekonomi

Keterbatasan yang dimiliki pihak nasional dalam trend pertumbuhan ekonomi nasional atau global secara pasti akan berpengaruh pada **taktik bisnis** perusahaan bagaimanapun baiknya, sehingga cenderung pertumbuhan ekonomi global memfokuskan pada usaha penyelamatan eksistensi ekonomi perusahaan dalam melaksanakan bisnisnya dan memanfaatkan peluang bisnis yang ada dapat terlihat pada pola pertumbuhan ekonomi yang alami dan dapat dicapai dengan meningkatnya kegiatan produksi akan produk teknologi canggih dan pemerataan pendapatan dalam memuaskan kebutuhan konsumen pada era globalisasi ekonomi misalnya secara eksternal meliputi : pertimbangan produksi, pemasaran, penjualan, peroleh keuntungan dan citra perusahaan dalam etika bisnisnya.

Demikian pula apabila kondisi ekonomi yang terlalu lemah tidak memberi peluang perkembangan budaya perusahaan sehingga mengakibatkan dan memperbesar ketergantungan, akan berakibat adanya jurang kesenjangan teknologi antara pihak asing dan pihak nasional. Untuk itu, pengembangan budaya perusahaan memacu berkembangnya pola hidup yang terlalu mengejar kebebasan mutlak sehingga menyimpang dari sistem nilai yang sudah ada yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Bagi pihak nasional / Indonesia, alih teknologi yang diharapkan dapat mempunyai dampak pada pertumbuhan ekonomi yang *sustainable*, menunjang pengembangan, penguasaan dan pemanfaatan Iptek bagi pembangunan nasional secara berkelanjutan. Namun alih teknologi akan berjalan mulus apabila dilandasi sikap bersahabat dan adanya kesamaan dan kesesuaian kepentingan antara kedua belah pihak.

3. Hukum

Penyelenggaraan kegiatan bisnis perusahaan haruslah sesuai dengan ijin yang dimiliki berdasarkan ketentuan Ijin Lokasi dari Pemerintah Daerah setempat, meskipun demikian perlulah kita memiliki aturan yang berkaitan dengan alih teknologi yang pada saat ini pihak nasional belum memiliki aturan tersebut, sehingga penyesuaian aturan mengacu pada UU No.1/ 1967 melalui proses penanaman modal asing yang pada dasarnya masih merupakan **hubungan kontraktual antara para pihak** yang dalam prakteknya ditentukan oleh kemampuan **negosiasi** merupakan kemampuan yang nyata ditandai dengan penandatanganan perjanjian para pihak, yang menunjukkan bahwa alih teknologi telah disetujui dialihkan dari pihak *transferer* / pemberi teknologi ke pihak *transferee* / penerima teknologi. Untuk itu, dalam prakteknya perlindungan hukum terhadap patent sangatlah merugikan. Begitu pula produk peraturan hukum memang merupakan sarana yang penting dalam

pengalihan teknologi berupa kegiatan hukum mencakup transaksi bisnis dalam kontrak pengalihan teknologi.

Dari uraian diatas tampak bahwa hukum sangatlah berperan dalam rangka pengalihan teknologi oleh perusahaan asing dan perusahaan nasional dalam suatu negara. Faktor yang mendorong hal tersebut, karena perilaku para pihak yang berkeinginan hidup secara pantas dalam mendapatkan keseimbangan hak para pihak untuk menghadapi hal-hal yang dirasakan tidak adil agar tercipta keseimbangan antara kepentingan-kepentingan para pihak yang mengadakan kontrak.

Dengan demikian, secara singkat dapatlah dikatakan bahwa hukum sangat dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang terjadi disekelilingnya. Begitu pula sebaliknya hukum dapat menyebabkan perubahan sosial dengan transfer teknologi yang membawa perubahan sosial tersebut dan sangatlah mempengaruhi hukum. Hukum harus berfungsi untuk membentuk dan memberi arah pada bidang-bidang yang berkaitan dengan perusahaan, kontrak alih teknologi dan konsumen.

Dapat dikatakan pula penggunaan teknologi telah membawa perubahan sosial menyangkut nilai-nilai dan asas-asas kehidupan yang fundamental. Penggunaan teknologi telah membawa negara yang menggunakannya ke arah modernisasi terhadap produk teknologi canggih yang pada dasarnya untuk melaksanakan modernisasi pembangunan ekonomi dengan adanya perubahan nilai-nilai dan pola perilaku yang masih tradisional dalam masyarakat

Indonesia. Meskipun belum tentu teknologi tradisional ini dapat menjamin tingkat hidup yang layak, walaupun demikian teknologi tradisional tetap dipilih sejauh teknologi itu tepat dan berguna. Dengan teknologi tersebut haruslah dapat membantu pembangunan ekonomi serta pengalihannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan tidak akan merugikan pihak negara penerima maupun pihak pemberi teknologi. Apabila lingkungan yang menerima teknologi itu tidak dipersiapkan seperti keadaan tersebut diatas maka pengalihan teknologi akan sukar untuk mencapai sasaran yang dikehendaki.

Kesulitan utama yang dialami negara penerima teknologi adalah kemampuan mengembangkan teknologi tepat guna yang relevan dengan tuntutan kebutuhan, dan membutuhkan waktu yang lama dan mahal. Sehingga alih teknologi disini selalu dikaitkan dengan usaha untuk memenuhi peningkatan kemakmuran rakyat.

Demikian pula, ketentuan-ketentuan hukum yang timbul dari alih teknologi secara khusus membawa aspek-aspek hukum baru yang pada hakekatnya belum diatur dalam ketentuan hukum suatu negara baik secara nasional maupun internasional, belumlah secara memuaskan mengatur ketentuan-ketentuan hukum mengenai alih teknologi yang berkaitan dengan kontrak alihnya, bahwa ternyata ketentuan tersebut hanya terdapat dalam peraturan nasional maupun internasional yang pada hakekatnya kurang memadai.

Peranan hukum dapat dilihat dari mekanisme alih teknologi itu sendiri melalui mekanisme pasar yang sebagian besar dapat diinternalisasi oleh penerima teknologi, sehingga terjadi pemindahan hak dari pemberi kepada penerima teknologi. Jadi disini sangat berperan hukum perjanjian atau hukum kontrak antara kedua belah pihak yakni pihak asing dan pihak nasional tentunya dengan campur tangan Pemerintah dalam rangka menentukan menerima atau menolak teknologi baru. Hal ini menyebabkan Pemerintah Indonesia tidak boleh segan untuk memanfaatkan potensi-potensi modal, teknologi dan skill dari pihak asing, asalkan tidak berakibat adanya ketergantungan pada pihak asing dan mempercepat serta melancarkan pembangunan di bidang hukum yang berkaitan dengan alih teknologi dengan kemampuan teknologi yang jauh lebih baik dan berkualitas.

Keterkaitan antara hukum dan pengalihan teknologi mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Hal ini disebabkan karena hukum mengatur pengalihan teknologi dalam masyarakat. Pengalihan teknologi tanpa adanya hukum yang mengatur, akan mengakibatkan kesimpangsiuran dalam masyarakat penerima teknologi / pihak nasional.

Dengan demikian, dalam rangka alih teknologi hukum merupakan sarana yang penting. Hukum harus berfungsi untuk membentuk dan memberi arah pada bidang-bidang itu, sehingga terdapatlah keserasian yang lebih mantap antara ketertiban dan ketentraman, pembaharuan dan kelanggengan, dengan

kebendaan dengan keahlakan.¹³ Dapat dikatakan pula bahwa hukum sangat dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang ada dan terjadi di sekeliling masyarakat dan begitu pula sebaliknya yang meliputi nilai-nilai dan pola tingkah laku tradisional masyarakat bagi pihak nasional dalam pengalihan teknologi yang terikat kesepakatan kontrak antara pihak nasional dan pihak asing. Penggunaan kontrak tersebut sebagai suatu sarana untuk menjamin perlindungan hukum dari perkembangan teknologi apabila terjadi kevakuman perundang-undangan mengenai hal tersebut.

4. Teknologi

Kegiatan bisnis perusahaan berorientasi pada peningkatan efisiensi, produktivitas kerja dan pemanfaatan kemajuan di bidang teknologi yang sangat membantu manajemen perusahaan untuk memenuhi kewajibannya kepada semua pihak. Kecepatan memberikan respon untuk memanfaatkan atau tidak teknologi sangat berpengaruh pada kemampuan perusahaan dalam mempertahankan dan mengembangkan eksistensinya tanpa mengabaikan usaha penyesuaian dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, jika terjadi sebaliknya akan gagal berkompetisi dalam bisnis yang dijalankan karena ketidakmampuan menyerap teknologi yang ditransfer oleh pihak asing. Penggunaan teknologi canggih sangatlah menonjol dan mendorong peran

¹³ Rosen Lawrence, *Law and Social Change In The New Nations, Comparative Studies In Society and History*, Jilid XX, No.1, Januari, 1978, hal.17.

sumber daya manusia dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan professional bagi tenaga kerjanya untuk beradaptasi dengan penggunaan teknologi secara intensif, berkaitan dengan perubahan desain produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Perubahan teknologi mensyaratkan adanya peningkatan kualitas manusia sebagai pelakunya. Kenyataan yang ada masih saja memperlihatkan dominasi teknologi tinggi asing dalam berbagai bidang dan apabila terjadi kesenjangan antara perusahaan asing dan nasional tidak terlepas dari kesenjangan ekonomi. Mengurangi kesenjangan ekonomi dengan cara memanfaatkan kemajuan teknologi yang telah dicapai oleh pihak asing¹⁴ dan telah dialihkan teknologinya sebagai alternatif yang tidak dapat dihindarkan oleh pihak nasional sampai mempunyai kemampuan untuk menghasilkan teknologi tinggi dengan paket pemilihan teknologi yang akan dialihkan.

Pemilihan paket teknologi yang akan dialihkan pada kriteria yang harus dipenuhi agar teknologi yang dialihkan dapat memberikan manfaat yang optimal. Beberapa kriteria tersebut adalah :¹⁵

- Penyesuaian ciri-ciri masyarakat dan nilai-nilai kebudayaan lingkungan penerima teknologi, disebabkan kemungkinan teralihkannya teknologi akan tergantung pada ciri-ciri masyarakat dan nilai-nilai kebudayaan

¹⁴ Ronny Hanintjo Soemitro, "*Masalah Alih Teknologi dan Hak Milik Intelektual*", Masalah-Masalah Hukum, No.1 Tahun 1987, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang 1987, hal.28.

¹⁵ Munadjad Danusaputro, *Regulasi dan Alih Teknologi Dalam Rangka Hukum dan Pembangunan*, Temu Ilmiah FH-UNDIP, Semarang, 1988, hal.8-9.

lingkungan penerima teknologi dan menentukan keberhasilan negara penerima teknologi yang dipengaruhi faktor-faktor meliputi kondisi tingkat kemajuan dan pendidikannya, kondisi sistem dan jaringan komunikasinya dan nilai-nilai kebudayaannya seperti sifat hemat, sifat ingin tahu, bekerja keras, disiplin, ulet, semangat kerjasama.

- Pertimbangan latar belakang kelahiran teknologi yang dialihkan, sehingga setiap teknologi dipikirkan dan dilahirkan, diciptakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna teknologi dengan jenis-jenis teknologi yang begitu saja dialihkan oleh pihak asing ke pihak nasional melalui penciptaan mesin-mesin dan sarana-sarana baru hasil teknologi untuk dialihkan kepada pihak nasional sehingga justru mendatangkan peningkatan pengangguran.
- Pemilihan teknologi secara tepat / *appropriate technology*, melalui faktor kemampuan riil bangsa untuk memperhatikan beberapa faktor : situasi dan kondisi masyarakat penerima di bidang khusus yang bersangkutan, keperluan masyarakat dalam waktu mendatang, serta perkembangan teknologi di dunia di sektor tersebut dalam kurun waktu sekitar 25 tahun mendatang.
- Perlu adanya inventarisasi dan evaluasi terhadap teknologi yang sudah ada sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan jenis-jenis teknologi apa yang perlu untuk dialihkan.

Setiap perubahan teknologi akan berpengaruh terhadap daur hidup pengembangan dan pembaruan akan produk baru teknologi canggih, sehingga dalam hal ini untuk merangsang pasar dengan kemajuan teknologi sangatlah dominan meskipun hal ini menyebabkan ketergantungan yang besar bagi pihak nasional terhadap asing sebagai pentransfer teknologi tersebut. Dengan adanya transfer teknologi yang berkesinambungan pihak nasional akan semakin tertinggal dengan pihak asing. Apalagi faktanya menunjukkan bahwa proses alih teknologi berjalan tersendat-sendat, sudah usang dan ketinggalan zaman.

5. Perbedaan norma dengan perusahaan asing

Pertentangan terhadap aturan yang berbeda tentang peraturan alih teknologi menimbulkan berbagai macam persepsi penyimpangan terhadap norma atau aturan hukum yang berkaitan erat dengan kontrak alih teknologi, misalnya di Indonesia belum memiliki UU Alih Teknologi sehingga kekuatan hukumnya masih sangat lemah dan belum dapat mengantisipasi permasalahan alih teknologi begitu pula sarana hukum yang digunakan belum memadai untuk memecahkan permasalahan tersebut, sedangkan di negara lain misalnya di **Mexico** – menyimpulkan 14 batasan dan syarat suatu kontrak alih teknologi dapat ditolak mulai dari larangan riset oleh pemegang *license* sampai larangan ekspor produknya ke seluruh dunia, **UU Argentina No.22.426** yang menyatakan alih teknologi antara perusahaan asing / lembaga harus meminta

persetujuan dari pemerintah dan didaftarkan kepada *National Institute Technology*.

6. Perbedaan kultur hukum terhadap alih teknologi

Para pihak yang mengadakan kontrak baik perusahaan asing atau perusahaan nasional memiliki kultur hukum yang berbeda satu sama lain. Kultur hukum pihak nasional masih bersifat tradisional sehingga sulit untuk mengembangkan teknologinya tanpa bantuan pihak asing. Lain halnya dengan pihak asing yang cenderung modern dalam mengembangkan dan menggunakan teknologi yang diperolehnya karena dipengaruhi faktor *knowledge, skill, availability, attitude* yang dominan.

7. Politik

Situasi dan kondisi politik yang tidak menentu akan menimbulkan ketidaktenangan, kecemasan, bahkan ketakutan hingga mempengaruhi kegiatan usaha dan keadaan ekonomi di bidang permodalan dalam mana kolusi terhadap perolehan fasilitas tertentu dalam permodalan, kebijakan ekonomi politik yang menguntungkan perusahaan disatu pihak tetapi merugikan pihak lain sehingga bertentangan dengan kepentingan nasional maupun asing dalam pengalihan teknologi dan merugikan masyarakat pengguna teknologi / konsumen.

C. Dampak Penyimpangan Pelaksanaan Kontrak Yang Merugikan Konsumen

Pada kontrak alih teknologi hubungan yang saling menguntungkan tidak selalu terjadi bahkan lebih banyak merugikan pihak penerima teknologi / pihak nasional. Faktor-faktor yang sangat mempengaruhi sebagai berikut :

1. Kualitas produk berubah

Produk bisa dikatakan sebagai unsur pemasaran yang paling krusial dalam alih teknologi dengan kualitas mutu akan produk teknologi yang ditawarkan oleh perusahaan melalui pengembangan teknologi produk dan visi manajemen perusahaan penerima teknologi dalam era pasar global dalam mengembangkan kebijakan dan strategi produk antara pihak asing dan pihak nasional berupa produk barang elektronik (PT AST Indonesia) alat berat (PT Kubota Indonesia) dan alas kaki (PT.Sepatu Bata Indonesia) yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Dengan kata lain kualitas produk berubah apabila :

- Standar atau regulasi produk yang tidak sesuai dengan aturan.
- Sistem pengukuran dan keseimbangan ukuran produk yang tidak cocok dengan perancangan produk.
- Iklim dan kondisi pemakaian yang tidak dapat beroperasi secara efektif dalam kondisi iklim dan lingkungan yang berbeda.
- Bahasa dan simbolisme yang berkenaan dengan kemasan / labeling dalam suatu produk terhadap cara pemakaian produk.

- Cacat produk terhadap preferensi model dan desain produk sehingga konsumen merasa dirugikan atas produk tertentu.

Karakteristik produk merupakan faktor penting untuk memegang kendali bila ada resiko kerugian potensial atas kualitas produksi terhadap rahasia teknologi pihak asing yang ditransfer kepada pihak nasional. Produk asing yang ditransfer tersebut sangatlah menguntungkan pengembangan teknologi pihak nasional. Meskipun demikian, kualitas produk alih teknologi yang berubah menciptakan inovasi produk dan proses produksi sehingga dimungkinkan untuk mampu mempermainkan daya saing antara pihak asing dan pihak nasional dimana pihak nasional baru saja menghasilkan produk yang sudah unggul dalam hal kemampuan, standar dan kualitas sebagai upaya untuk menciptakan kemampuan teknologi yang berkesinambungan dalam kegiatan ekonomi. Dalam hal ini, salah satu bentuk alih teknologi dilakukan dengan waktu singkat melalui rekayasa berbalik (*reverse engineering*) yakni produk teknologi dari pihak asing yang masuk dibongkar, ditiru dan diadaptasi dan akhirnya di pasang lagi.

Menurut teori daur hidup produk (*product life cycle*) dari Raymond Vernon (1966) yang menyatakan bahwa produksi berubah sejalan dengan usia produk tersebut, yaitu dari tingkat eksperimental (*science based*) sampai pada tahap standarisasi melalui penyerapan (*diffusion*), peniruan (*imitation*), dan relokasi produksi dalam memperoleh keunggulan komparatif yang mencakup beberapa faktor : inovasi produk dan proses, keuntungan sebagai inovator pertama,

skala dan cakupan ekonomis, eksploitasi pasar (*oligopolistik*).¹⁶

Konsumen akan menyukai produk yang menawarkan kualitas produk dengan memperhatikan tinggi rendahnya kualitas produk, sehingga produk tersebut dapat memberikan kepuasan terhadap konsumen yang merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan.

2. Harga rendah

Penetapan harga merupakan elemen bauran pemasaran yang memberikan masukan bagi perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah :¹⁷

Pertama, biaya produk yang menentukan harga dasar atau harga minimum. Meskipun harga bisa ditetapkan lebih rendah daripada harga dasar tapi hanya segelintir perusahaan saja yang bersedia rugi terus-terusan bilamana produk yang dihasilkan sedikit.

Kedua, harga produk setara buatan pesaing menentukan harga maksimum atau batas atas baik dalam kompetisi asing maupun nasional.

Ketiga, harga optimum merupakan fungsi permintaan akan produk yang ditentukan oleh kemauan dan kemampuan konsumen untuk membeli. Harga dalam bisnis harus selalu dievaluasi secara reguler dan disesuaikan bilamana diperlukan, bervariasi tergantung pada siklus hidup produk dan persaingan

¹⁶ Vernon R., *International Investment and International Trade in Product Cycle*, The Quartely Journal of Economics 80 : 255-267.

¹⁷ Chandra Gregorius, *Pemasaran Global*, disunting oleh Tjiptono Fandy, ANDI, Yogyakarta, 2001, hal.170.

bisnis untuk berebut posisi pasar dan kesediaan serta kemampuan konsumen di setiap negara.

Dengan demikian, kualitas produk yang rendah maka harga produkpun cenderung rendah berdasarkan kualitas, mutu produk yang dihasilkan oleh perusahaan berteknologi canggih. Sehingga menyebabkan konsumen akan mencari produk berteknologi tinggi berkualitas dengan harga yang kompetitif. Jadi, penetapan harga produk mengupayakan agar produk dapat diterima oleh pasar, mempertahankan kekuatan produk di pasar dalam menghadapi persaingan serta menciptakan keuntungan merupakan cara terbaik untuk memasuki pangsa pasar yang mengutamakan kualitas produk diatas harga produk pesaing dalam persaingan bisnis tersebut dan harga produk yang berubah sangatlah mempengaruhi posisi bersaing perusahaan baik pihak asing maupun pihak nasional. Untuk itu harga merupakan variabel yang dapat dikendalikan dan yang menentukan diterima tidaknya suatu produk teknologi oleh konsumen, dan harga tergantung pada kebijaksanaan perusahaan asing dan perusahaan nasional yang akan ditentukan tidak terlalu tinggi atau bahkan sebaliknya.

3. Bahaya kesehatan

Dalam era global ini, banyak sekali produk dihasilkan dapat membahayakan pemakai / konsumen atau bahkan ketidakjelian proses operasi bisa berakibat konsumen rugi. Apabila pihak tertentu menginginkan bahwa alih teknologi “alas kaki” Sepatu Bata yang merupakan produk Bata Indonesia sebagai

produk yang menguntungkan perusahaan dalam mana mutu dan kualitas produk tetap terjaga sehingga terhindar dari resiko cacat produk.

Ketidakpuasan konsumen atas produk yang cacat produksi menurut Folkes¹⁸ mempengaruhi harapan yang berhubungan dengan kegagalan produk dengan pengembalian uang seketika daripada penggantian produk. Contohnya produk yang membahayakan konsumen atas alas kaki yang membuat kaki bengkak setelah memakai produk tersebut dan konsumen klaim ke PT Sepatu Bata Indonesia dan kasus tersebut diselesaikan dengan pihak perusahaan dan tidak ada konsumen yang mengadu ke lembaga yang berwenang, dalam hal ini YLKI, dan kasus tersebut ternyata hanya dalam intern perusahaan saja dan konsumen.

¹⁸ Valerie S. Folkes, Susan Kolestsky, dan John L. Graham, *A Field Study Of Casual Inferences and Consumer Reaction : The View From The Airport*, Journal of Consumer Research 13, 1987, hal.534-539.

BAB IV

PENINGKATAN PENGUASAAN TEKNOLOGI DALAM RANGKA MELINDUNGI KONSUMEN

Dalam upaya untuk membangun kekuatan industri maka faktor yang perlu diperhatikan adalah kebutuhan akan teknologi, yang pada dasarnya merupakan salah satu kunci yang sifatnya menentukan kehidupan industri baik asing maupun nasional. Demikian pula teknologi merupakan faktor penentu dalam pertumbuhan dan perkembangan industri dalam era globalisasi ekonomi, apakah teknologi itu berasal dari pihak asing ataupun pihak nasional sendiri. Dengan memperhatikan arti dan peran teknologi yang begitu penting dalam industri, maka tidak mungkin apabila pencapaian sasaran pembangunan industri nasional dapat dilakukan dengan mengabaikan teknologi.

Peranan teknologi¹ sebagai wahana transformasi teknologi menuju pembentukan masyarakat industri yang mampu menguasai IPTEK untuk hari depan bangsa.

Menurut B.J. Habibie ada lima prinsip yang harus diikuti untuk mencapai penguasaan IPTEK meliputi :

Pertama, melakukan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam bidang-bidang IPTEK yang relevan dengan pembangunan bangsa.

¹ B.J. Habibie dalam Makalah *Ekonomi Berbasis Teknologi Tinggi Sebagai Dimensi Ketiga PJPT Kedua* oleh Agustina, S. Vina, Sintesis, Tahun 4, Juli-Agustus, 1996, hal.28.

Kedua, mengembangkan konsep masyarakat teknologi dan industri yang bersedia melakukan usaha serius dalam merealisasikan konsep tersebut.

Ketiga, adanya transfer, aplikasi dan pengembangan lebih jauh teknologi yang diarahkan pada pemecahan masalah-masalah konkret.

Keempat, kemandirian teknologi, tanpa harus bergantung terus pada dukungan pihak asing meliputi : menggunakan teknologi yang ada untuk memproduksi barang-barang kebutuhan masyarakat, mengintegrasikan teknologi yang ada untuk menciptakan desain dan produk-produk baru, pengembangan lebih jauh teknologi yang ada, melakukan riset ilmu-ilmu dasar untuk menunjang teknologi terapan.

Kelima, adanya perlindungan terhadap teknologi yang dikembangkan di dalam negeri sampai mampu bersaing di arena internasional.

Pada hakekatnya lima prinsip diatas ini menekankan perlunya pengembangan industri dan teknologi canggih.

Dengan memperhatikan kemampuan bangsa Indonesia / pihak nasional dalam bidang teknologi, yang belum cukup untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan industrialisasi maka peningkatan penguasaan teknologi melalui alih teknologi merupakan alternatif yang tidak dapat dihindarkan, sehingga harus dilakukan agar dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia.

A. Pemerintah Dalam Pengembangan Teknologi

1. Peningkatan “Kaderisasi” Ketrampilan Teknologi

Perkembangan kemampuan internal perusahaan dalam peningkatan ketrampilan dan penguasaan teknologi dengan intervensi pemerintah dalam

menetapkan kebijakan atas produk teknologi. Intervensi pemerintah dalam pengembangan kemampuan teknologi adalah penting. Ada dua bentuk intervensi pemerintah yaitu :

Pertama, intervensi fungsional mengatasi kegagalan pasar yang bersifat generik tanpa memprioritaskan satu sektor relatif terhadap sektor lainnya.

Kedua, intervensi selektif mengatasi kegagalan pasar dalam jenis aktivitas ekonomi tertentu yang memprioritaskan industri tertentu relatif terhadap industri lainnya. Walaupun kita tahu bahwa intervensi pemerintah di Indonesia sangatlah tinggi maka akan sangat menyulitkan kemampuan bersaing kita. Jadi kalau semakin sedikit intervensi pemerintah terhadap birokrasi perusahaan yang menghasilkan produk-produk berteknologi tinggi, itu akan memudahkan dan meningkatkan daya saing dari produksi tersebut. Karena mereka tidak terbiasa diberi berbagai fasilitas-fasilitas tertentu oleh pemerintah. Bahkan yang paling penting lagi, mereka tidak direcoki. Karena banyak sekali dari pemerintah yang beranggapan bahwa perusahaan itu bisa dijadikan sapi perah² oleh aparat-aparat birokrasi pemerintah atau bahkan sebaliknya birokrasi-birokrasi tidak bisa mengambil sikap yang lugas terhadap iklim yang kompetitif dalam dunia usaha.

² Mas'ood, Mohtar, *Pengembangan Teknologi Tinggi Dimaksudkan Agar Daya Saing Produk Nasional Tinggi dan Nilai Tambahnya Pun Tinggi*, Sintesis No.16, Tahun Ke-4, Juli-Agustus, 1996, hal.90.

Dengan demikian, pemerintah melakukan intervensi diatas dalam menentukan dan membangun jenis-jenis industri teknologi tinggi melalui proteksi, subsidi dan penyertaan investasi, dan pengembangan kualitas sumber daya manusia dengan ketrampilan yang tinggi untuk menopang peningkatan pengembangan teknologi yang berkualitas tinggi pula dengan sistem ekonomi nasional yang mengarahkan pemanfaatan *productive human capital* untuk tujuan ekonomi yang betul-betul produktif secara wajar.

Meskipun demikian, pengembangan teknologi merupakan suatu proses melingkar.³ Pengembangan kemampuan teknologi sebagai usaha untuk mempercepat penyerapan teknologi merupakan “keunggulan” dalam pengembangan teknologi melalui daya saing nasional di pasal global dengan makin tinggi bila produk-produknya juga makin padat teknologi. Sehingga dalam hal ini, sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing produk asing dan nasional dapat dilakukan dengan dua macam pendekatan yaitu :⁴

Pertama, pendekatan fraksional : perhitungan produktivitas tenaga kerja, modal, produksi, organisasi, penjualan dan produk.

Kedua, pendekatan integrative : bahwa sumber daya manusia adalah komponen dari satu teknologi (*humanware* disamping *technoware*, *infoware*

³ Juoro, Umar, *Mempercepat Proses Pembudayaan Teknologi*, Economica No.15 Vol.VII, Jakarta, 1985.

⁴ Iskandar, Untung, *Pendekatan Ekonomi Masa Depan : Produktivitas dan Daya Saing*, Sintesis No.16 Tahun Ke-4, Juli-Agustus 1996, hal.69.

dan *orgaware*) dimana setiap komponen memiliki tingkat kecanggihan dan mutu teknologi dan mutu teknologi yang lain.

Untuk itu, kemampuan dalam mengembangkan teknologi menuju kepemimpinan teknologi, memperbaiki teknologi mature dan mengembangkan teknologi baru serta mengembangkan produk teknologi dengan inovasi sangatlah mutlak diperlukan dalam mengembangkan, meningkatkan kualitas teknologi akan produk-produk teknologi di pasar global.

2. Pencapaian Keunggulan Teknologi

Apabila dikaitkan dengan kompetisi dalam usaha antara pihak asing dengan pihak nasional, peranan Pemerintah sangatlah mutlak diperlukan. Dalam kompetisi atau persaingan usaha, kata kunci untuk membangun kemampuan dalam rangka meraih keunggulan teknologi : ilmu pengetahuan dan teknologi, ketrampilan, informasi dan pengalaman, akses pasar dan keuangan.

Meningkatnya dinamika kompetisi yang demikian inilah menimbulkan berbagai masalah yang berkaitan dengan peranan interaksi antara pemerintah dengan perusahaan sesungguhnya amat beragam dan *multifacet*. Misalnya, peranan pemerintah melalui perijinan menimbulkan relatif banyak perusahaan atau industri yang beroperasi memiliki kapasitas berlebih (*excess capacity*) yang luar biasa dan ketidak efisienan komersial yang parah sehingga

mengakibatkan kompetisi yang berlebihan dan kemerosotan kehidupan industri di bidang teknologi.

Kendati demikian, peranannya paling tepat akan sangat bergantung pada kompetensi dan magnifikansi kedua belah pihak (pengusaha dan pemerintah) juga pada luasnya jangkauan intervensi pemerintah dalam bidang alih teknologi melalui pengkaderisasian tenaga kerja terhadap ketrampilan teknologi dengan cara pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan teknologi di luar negeri.

Sebenarnya pemerintah dapat membentuk "Biro bisnis yang lebih baik (*better business bureau*) untuk mempertahankan praktek-praktek bisnis yang baik dan memperingatkan kepada konsumen untuk lebih berhati-hati dalam membeli suatu produk berteknologi tinggi. Demikian pula, pemerintah juga haruslah memiliki suatu kepercayaan terhadap pihak asing yang telah mentransfer teknologi dalam bentuk produk berteknologi tinggi melalui suatu fungsi penegakan hukum. Meskipun demikian, perlindungan hukum terhadap konsumen⁵ masih bersifat terbatas sebagai suatu *political will* dan belum berkembang sebagai *political action* pemerintah.

⁵ Permadi, *Pola Masyarakat Terhadap Perlindungan Konsumen*, Simposium Aspek-Aspek Masalah Perlindungan Konsumen, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Dep-Keh tanggal 16-18 Oktober 1980 di Jakarta, diedarkan oleh Bina Cipta, 1986.

B. Pelaksanaan Struktur Perusahaan Sebagai Upaya Peningkatan Kemampuan Penyerapan Teknologi

Teknologi yang diharapkan terjadi dengan masuknya modal asing di sektor ekspor di bidang teknologi ternyata tidak menjadi kenyataan. Pihak asing terbukti tidak bersedia untuk melakukan transfer teknologi secara penuh kecuali secara parsial untuk memudahkan operasi-operasi mesin-mesin yang diimpor. Kegiatan R & D berkaitan dengan produk, peralatan dan proses produksi tidak pernah dibiayai oleh pihak asing di negara-negara berkembang misalnya di Indonesia dimana mereka menjalankan operasinya.

Sementara itu, perusahaan nasional dalam mengembangkan teknologi mengandalkan *licensed technology* dan ternyata tidak menimbulkan kapasitas untuk melakukan inovasi yang mandiri (*self-sustaining innovation*). Sehingga banyak perusahaan nasional mempunyai misi ganda dalam menciptakan iklim berusaha bertindak dengan gaya birokrasi bercirikan pengaturan yang bersifat formal dalam kemampuannya menjalankan kegiatan yang menghasilkan ekonomi skala, menyingkirkan keleluasaan manajerial dengan formalisasi tinggi yang telah diterapkan dalam peningkatan kemampuan teknologi.

Perkembangan teknologi di Indonesia amat sulit dipisahkan dari peran Habibie dengan 8 (delapan) konsep “ wahana industri (industri pesawat terbang, kimia, elektronika, transportasi darat, peralatan pertanian, kapal laut, rekayasa dan permesinan umum)”, serta menitikberatkan pada upaya melakukan lompatan

teknologi lewat teknologi tinggi dan peningkatan kualitas SDM untuk mencapai keunggulan kompetitif dalam memperoleh nilai tambah⁶ yang lebih tinggi dari produk prioritas dengan penerapan teknologi.

Untuk itu, peningkatan kemampuan teknologi melalui pemasaran perusahaan nasional sangat memudahkan dan mendukung pertukaran dalam mempengaruhi konsumen atas produk perusahaan tersebut secara efektif yang memerlukan berbagai kegiatan bisnis teknologi tinggi bergantung pada penerapan alih teknologi yang dilaksanakan oleh perusahaan tersebut.

Adalah mutlak untuk menentukan arah dan sasaran dari pengembangan teknologi karena teknologi itu tidak boleh masuk tanpa kejelasan tempatnya dalam keseluruhan rencana pengembangan teknologi itu. Jadi rencana pengembangan teknologi itu bisa berperan sebagai “*filter*” dari teknologi itu berperan perusahaan, berbagai kontrak alih teknologi antar perusahaan. Elemen rencana pengembangan teknologi meliputi :⁷

Pertama, importasi teknologi asing yang sesuai dengan kebutuhan.

Kedua, pengembangan teknologi domestik melalui riset dan pengembangan (R & D) serta penyediaan tenaga ahli.

Ketiga, mengubah kesenjangan antara negara maju dengan negara sedang berkembang secara bertahap.

⁶ Habibie dalam “*Konsep Transformasi Teknologi Versi Habibie*” dalam Makalah yang berjudul “*Pengembangan Ekonomi Berdasarkan Nilai Tambah dengan Orientasi Pengembangan Teknologi dan Industri*”, CIDES, Jakarta, tanggal 28 Januari 1993.

Yang pasti, teknologi tinggi tidak akan bisa tumbuh subur tanpa adanya **kepastian hukum** atau tanpa adanya penerimaan akan nilai-nilai yang menyertai alih teknologi tersebut. Karena apabila kepastian hukum / supremasi hukum tidak ada maka akan amat banyak terjadi penyimpangan alih teknologi.

Dengan demikian, pelembagaan dalam penguasaan peningkatan teknologi bekerja untuk menghasilkan pemahaman mengenai perilaku apa yang tepat, terutama dan bermakna⁸. Jadi birokrasi perusahaan dilakukan dengan pendekatan eksekutif yang menyatakan bahwa birokrasi perusahaan memiliki karakteristik meliputi : inovasi dan pengambilan resiko, orientasi hasil, orientasi orang, orientasi tim, keagresifan dan kemantapan dalam kegiatan perusahaan dan pertumbuhannya sehingga budaya perusahaan sangatlah mutlak diperlukan sebagai salah satu upaya peningkatan kemampuan teknologi untuk beradaptasi dalam rangka melindungi konsumen. Sehingga birokrasi yang baik dan dapat mencerminkan sikap pertumbuhan ekonomi adalah model yang mengarah pada *service* yaitu mempermudah suatu prosedur dalam mengatasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan keunggulan teknologi.

Meskipun demikian, prospek perkembangan teknologi dalam rangka peningkatan kemampuan dapat memacu pertumbuhan ekonomi nasional asalkan teknologi dianggap sebagai alat yang mampu meningkatkan kesejahteraan

⁷ Lubis T. Mulya, *Hukum dan Ekonomi*, Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hal. 6.

⁸ Stephen P. Robbins, *Organizational Behavior*, dialihbahasakan oleh Hadyana Pujaatmaka, Prentice Hall, Inc., 1996.

C. Aspek Hukum dan Kemajuan Teknologi Dalam Menciptakan Iklim Usaha Yang Sehat.

Pembangunan teknologi mengakibatkan perubahan perilaku masyarakat terhadap kontrak alih teknologi dalam mencapai tujuan atau pengejaran tujuan dari *Talcott Parsons* terhadap perlindungan hukum, teknologi serta terhadap konsumen atas pengalihan teknologi yang masuk pangsa pasar yang dilakukan oleh pihak asing dan pihak nasional afiliasinya dilakukan secara intern oleh perusahaan tersebut. Kegiatan alih teknologi merupakan hubungan hukum antara pemberi teknologi / pihak asing dengan penerima teknologi / pihak nasional yang mengadakan kesepakatan diantara kedua belah pihak dalam produk hukum yang selanjutnya membentuk lembaga hukum yang mengatur interaksi antara kedua belah pihak tersebut. Suatu pengalihan teknologi yang berhasil mempunyai dua sifat menonjol dan pengalihan itu memberikan keuntungan yang berarti dan berlangsung lama bagi kedua belah pihak, didasarkan atas saling pengertian diantara para pihak mengenai tujuan dan keinginan⁹. Peningkatan kapabilitas teknologi sangatlah meningkatkan *social absorption capacity* suatu negara yang meliputi aspek sosio-kultural, kesiapan kualitas sumber daya manusia, aspek kelembagaan dan kesiapan birokrasi.

⁹ James D. Grant, *Teknologi : Penciptaan dan Pengalihannya, dalam Pieter Kuhn, ed.*, Perusahaan Transnasional, terjemahan S. Maimun, Yayasan Obor Indonesia dan PT. Gramedia, Jakarta, 1987, hal. 225.

Faktor lain meliputi infrastruktur pemasaran, infastruktur keuangan¹⁰, kapabilitas teknologi dan sebagainya. Dengan begitu dimungkinkan terciptanya suatu iklim yang sehat bagi pertumbuhan aktor-aktor ekonomi dalam menghadapi ketatnya persaingan terhadap teknologi yang dihasilkan. Sudah barang tentu, terciptanya iklim demikian juga membutuhkan syarat lingkungan industri dan perekonomian nasional yang kondusif sehingga menjamin dinamika para aktor-aktor ekonomi sejalan dengan potensi ekonomi yang dimilikinya. Dengan kata lain, adanya relevansi kapabilitas teknologi dengan penguatan daya saing bagi pihak nasional dalam menghadapi era kemajuan teknologi yang membantu alih teknologi asing ke perusahaan nasional, sehingga pihak nasional dapat memiliki keunggulan akan peningkatan produksi. Namun demikian kemampuan teknologi asing yang dialihkan yang ada diantara kedua belah pihak harus diperhatikan. Keadaan ini akan mengarahkan usaha peningkatan kemampuan dan kapasitas teknologi dalam penguasaan peningkatan kemampuan teknologi.

Persaingan antara pihak asing dan pihak nasional dalam bisnis diatas hanyalah untuk mendapatkan uang konsumen. Dengan konsekuensi memberikan keuntungan bagi konsumen berupa harga rendah, pelayanan yang lebih baik dan peningkatan kualitas produk dalam membuat *profit oriented* suatu perusahaan.

¹⁰ Khusus mengenai infrastruktur keuangan, praktek yang lazim dilakukan dalam penjualan produk-produk berteknologi tinggi adalah dengan melibatkan lembaga-lembaga keuangan. Dalam kasus penjualan Pesawat Boeing ditopang sepenuhnya oleh Bank Exim America Serikat. Jadi hampir mustahil jika pihak nasional membayangkan produk-produk berteknologi tinggi seperti pesawat terbang dibeli langsung serta tunai atau kredit oleh maskapai penerbangan tanpa diimbangi dengan kesiapan lembaga keuangan yang memadai akan mengalami kesulitan untuk menjual produk-produknya.

sehingga perhatian kegiatan bisnis tersebut terhadap konsumen tampak makin besar karena persaingan makin ketat dan adanya anggapan bahwa konsumen merupakan “raja”¹¹, begitu pula konsumen selalu menginginkan produk yang terbaik sesuai dengan harga yang dibayarkannya dan produk tersebut dapat diandalkan. Sehingga dalam menciptakan iklim persaingan sehat dalam dunia usaha tersebut berdampak pada efisiensi produk yang dapat memuaskan konsumen tanpa adanya benturan-benturan yang menimbulkan sikap tidak jujur dan tidak patuh terhadap standar etika bisnis sehingga tidak dapat menumbuhkan sikap rasa saling percaya, saling menghormati diantara para pihak dalam melakukan bisnisnya agar bisnis yang dijalankan terlindungi dan tetap terjaga untuk bersaing secara sehat dengan struktur dunia usaha yang kokoh dalam perlindungan teknologi terhadap konsumen.

1. Perlindungan Teknologi

Dalam upaya mendorong semangat penemuan teknologi baru, dengan memberikan perlindungan hukum yang pasti terhadap teknologi maka pihak nasional / Indonesia mengeluarkan Undang-undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten yang berlaku mulai 1 Agustus 1991. Dengan Undang-undang tersebut, dalam menyongsong era industrialisasi diharapkan alih teknologi dari pihak

¹¹ Anoraga, Pandji, *Manajemen Bisnis*, Rineka cipta, Jakarta, 1997, hal. 13.

asing dapat berjalan lancar. Demikian pula diharapkan bahwa pengembangan kemampuan teknologi dari pihak asing dapat ditingkatkan.

Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Paten tersebut memberikan perlindungan hukum kepada penemu teknologi atau pemilik teknologi bagi pihak asing dan pihak nasional. Dengan perlindungan hukum ini, pemilik teknologi asing dapat mengajukan permintaan hak paten dengan 2 (dua) cara yaitu :

- Penemuan yang telah mempunyai hak paten di negara asalnya, dapat dimintakan paten di Indonesia dengan menggunakan hak prioritas sebagaimana diatur dalam Konversi Internasional mengenai perlindungan paten yang diakui oleh Indonesia dan diikuti pula oleh negara penemuan tersebut¹².
- Penemuan yang belum pernah dimintakan paten oleh penemu di negara asalnya, dapat dimintakan paten di Indonesia, harus diajukan melalui konsultan paten di Indonesia sebagai kuasanya. Penemu atau yang berhak atas penemuan yang mengajukan permintaan paten tersebut harus menyatakan atau memilih tempat tinggal atau kedudukan hukum di Indonesia untuk penentingan paten¹³.

¹² Undang-undang Nomor 8 Tahun 1989 tentang Paten, Pasal 29, 31, 32 Lembaran Negara Nomor 39 Tahun 1989.

Meskipun demikian, tidak adanya perlindungan paten di negara penerima teknologi merupakan alasan keengganan pemilik teknologi untuk mengalihkan teknologinya. Padahal kegunaan paten dalam pengembangan teknologi sangatlah mutlak untuk mendorong alih teknologi melalui 5 (lima) jalur¹⁴ :

- 1) Memberikan insentif bagi upaya untuk menghasilkan teknologi baru secara sukses;
- 2) Menciptakan iklim kondusif suatu penerapan teknologi baru secara sukses;
- 3) Mendorong alih teknologi baik karena informasi tentang teknologi yang tersedia dalam dokumen-dokumen paten atau penawaran umum untuk dapat dilisensi;
- 4) Merupakan alat bagi perencanaan industri baik pada tingkat teknis / perusahaan maupun tingkat makro; dan
- 5) Mendorong minat bagi kalangan penanam modal.

Dengan adanya ketentuan tersebut, maka pihak nasional / Indonesia sebagai pihak yang membutuhkan teknologi dari luar / pihak asing dengan melakukan paket teknologi yang akan dialihkan dalam rangka perlindungan konsumen agar tidak merugikan perekonomian Indonesia dan tidak akan menghambat

¹³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1989, Pasal 28.

¹⁴ Sugito, Sentot Prihandajani, *Pendayagunaan HAKI atas Hasil Penelitian dan Temuan Teknologi Bagi Kalangan Perguruan Tinggi di Indonesia*, Makalah Forum Diskusi Panel HAKI dalam rangka Dies Natalies XXXVI, UNBRAW, 1998, hal. 6.

kemampuan bangsa Indonesia dalam penguasaan dan pengembangan teknologi pada umumnya. Dalam hal ini, alih teknologi memang mengarah pada ketergantungan teknologi yang berkelanjutan¹⁵, meskipun perusahaan nasional bergantung pada penyediaan teknologi pihak asing dalam jangka pendek, ketergantungan demikian sangatlah kurang begitu diharapkan dari sudut pandang sosial yang cenderung menggunakan kemampuan teknik walaupun masih dari sudut pandang sosial yang cenderung menggunakan kemampuan teknik walaupun masih dalam keterbatasan, kurang efisien dan kemungkinan untuk menghindari sumber tenaga ahli asing dengan jalan mengembangkan teknologi yang cocok serta seringkali teknologi lokal yang dikembangkan risikonya lebih besar dibanding usaha untuk mencoba ditawarkan kepada pihak asing sangatlah mengganggu jalannya pembangunan ekonomi nasional. Seperti yang dikemukakan Poernomosidi Hadjisarosa¹⁶ pengembangan teknologi intinya memberikan sumbangan berupa peningkatan produktivitas tenaga kerja, peningkatan produktivitas memungkinkan ditingkatkannya pendapatan tenaga kerja, harus diimbangi dengan peningkatan harga. Selain dari itu, pengembangan teknologi diarahkan untuk meningkatkan reproduksi yaitu menekan serendah-rendahnya kemungkinan yang menyebabkan kelainan hasil produksi, sebagai bagian dari usaha untuk

¹⁵ Mimbar Economica mengangkat makalah dengan judul "*Pola dan Permasalahan Alih Teknologi*", nomor : 15 Volume VII, 1985, hal. 5.

¹⁶ Hadjisarosa, Purnomosidi, *Mengapa Tiap Bangsa Memerlukan Teknologi Tetapi Belum Semua Mampu Melahirkannya ?*, Economica No. 15, Volume VII, 1985, hal. 16.

meningkatkan mutu hasil produksi. Dan untuk mengimbangi peningkatan produktivitas tenaga kerja, pengembangan teknologi menuntut perluasan pasar. Sehingga dapat memberikan peluang bagi berlangsungnya pengembangan teknologi. Untuk mengembangkan teknologi sendiri diperlukan landasan kemampuan sumber daya manusia, yaitu tenaga, peralatan, sarana dan prasarana lain serta dana yang memadai. Apabila tidak ada kemampuan untuk mengembangkan teknologi sendiri, atau dalam keadaan sudah sangat mendesak, teknologi sendiri, teknologi dapat dibeli, selanjutnya dialihkan, disesuaikan dan diterapkan untuk memenuhi sesuatu kebutuhan. Dalam proses alih teknologi ini diperlukan juga kemampuan sumber daya, sebab pada akhirnya teknologi tersebut harus dapat dikuasai sendiri untuk peningkatan kemampuan berteknologi.

2. Perlindungan Konsumen

Pembangunan perekonomian nasional dalam era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan produk yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengakibatkan kerugian konsumen produk teknologi tersebut. Sehingga baik perusahaan asing maupun perusahaan nasional berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas produk untuk menjamin

kelangsungan usaha produksi, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Produk yang baik dengan dukungan kompetensi dalam teknologi akan menghasilkan tawaran produk yang selaras dengan kebutuhan pasar, sehingga produk tersebut benar-benar akan diterima oleh konsumen. Dalam kemudahannya untuk mendapatkan produk di pasar perlu juga diperhatikan. Kelangkaan produk, kualitas produk mungkin turun, harga mungkin tidak kompetitif yang akan menimbulkan kekecewaan konsumen dan memudahkan pesaing untuk merampas pasar yang telah dikuasai oleh perusahaan tersebut.

Oleh sebab itu, perusahaan berusaha untuk tetap *survive*, baik dengan cara yang halal atau bahkan ada yang menggunakan segala cara yang sebenarnya melanggar hukum, norma masyarakat dengan orientasi keuntungan dalam ukuran ekonomi yang menguntungkan bagi dunia usaha mereka.

Persepsi konsumen terhadap inovasi teknologi¹⁷ berpengaruh kuat terhadap kecepatan proses adopsinya. Inovasi dipersepsikan superior dibandingkan dengan produk lain yang akan diadopsi secara lebih cepat daripada produk-produk tanpa keunggulan relatif. Bila konsumen gampang memahami fungsi suatu inovasi dan dimungkinkan bagi mereka mencobanya, maka produk akan

¹⁷ Chandra, Gregorius, disunting oleh Tjiptono Fandy, *Pemasaran Global*, ANDI, Yogyakarta, 2001, hal. 60.

diadopsi secara cepat, produk lebih murah dan lebih kompatibel dengan nilai budaya dan cara tradisional melakukan sesuatu akan diadopsi lebih cepat dengan kualitas produk baru.

Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha perusahaan baik perusahaan asing maupun perusahaan nasional tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat dan mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui produk teknologi yang berkualitas tinggi.

Dengan demikian, perlindungan konsumen dilaksanakan berdasarkan 2 (dua) asas meliputi :

- Asas keamanan dan keselamatan konsumen untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan produk teknologi yang dikonsumsi atau digunakan.
- Asas kepastian hukum, agar baik perusahaan asing / nasional serta konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen dan negara / pemerintah menjamin kepastian hukum.

Keberpihakan pemerintah, perusahaan terhadap konsumen alih teknologi terhadap produk teknologi tinggi untuk meningkatkan sikap peduli terhadap konsumen (*wise consumerisme*), sehingga konsumen tidak merasa dirugikan. Kalaupun konsumen merasa dirugikan, konsumen harus berani mengklaim dan bila perlu mengajukan tuntutan perdata dan pidana sekaligus mengajukan tuntutan ganti rugi materiil dan imateriil. Oleh karena itu, konsumen sebagai pemakai produk tersebut untuk kepentingan konsumen berada dalam posisi yang lemah karena perusahaan (pengusaha baik asing maupun nasional) memiliki daya dan dana yang membentuk *image* suatu produk yang berbeda dengan harapan bahkan bertentangan dengan apa yang diharapkan konsumen atas suatu produk.

Untuk itu, dengan adanya lembaga perlindungan konsumen seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan sejenisnya, dapatlah kita harapkan bisa mengoptimalkan perlindungan konsumen dan termasyarakatkan hak-hak konsumen. Sehingga dalam hal ini, pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen agar menjamin hak dan kewajiban konsumen dan perusahaan baik asing maupun nasional sehingga tercipta iklim usaha dan hubungan sehat dalam usaha penciptaan iklim persaingan yang sehat.

Sebaliknya persaingan tidak sehat sesungguhnya sangat tidak menguntungkan pihak asing sebagai pemilik modal, teknologi, skill dan pengalaman usaha mereka. Meskipun demikian, teknologi canggih dapat mempengaruhi selera konsumen terhadap produk-produk baru yang berkualitas tinggi sehingga disini

teknologi berfungsi sebagai alat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, tidak terbatas pada peran statis sebagai alat *problem solving* untuk perekonomian nasional dalam menciptakan arah pembangun ekonomi dan kemampuan bersaing dalam mekanisme pasar dengan *profit making center* (dituntut untuk bisa membuat keuntungan). Sehingga hal tersebut akan dapat menjamin pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan dan menghasilkan peningkatan kesejahteraan terhadap pengguna teknologi canggih, karena teknologi hanya dimanfaatkan sebagai alat untuk memecahkan persoalan dan tujuan yaitu pertumbuhan kepercayaan konsumen dan perluasan kesempatan kerja dengan kualitas SDM yang handal dalam penguasaan teknologi. Dengan demikian, persaingan dalam pengembangan teknologi melalui produk teknologi memang diperlukan sebagai rangsangan ekonomi yang tepat dalam kompetisi global atas produk-produk teknologi canggih yang mampu bersaing di pasar global.

Oleh karena itu, penciptaan iklim usaha sehat harus terus dikembangkan melalui pengadaan sarana dan prasarana ekonomi yang memadai, peraturan perundang-undangan yang memadai, peraturan perundang-undangan yang mendukung pelayanan teknologi canggih serta kebijaksanaan ekonomi makro yang tepat yang berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi berlandaskan kepada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan pemanfaatan modal, teknologi, keahlian yang tersedia dari pihak asing yang segala sesuatunya benar-benar diabdikan pada kepentingan ekonomi rakyat nasional tanpa mengakibatkan ketergantungan pada pihak asing yang berdampak buruk bagi pertumbuhan dan perkembangan

teknologi dalam era globalisasi ekonomi di kemudian hari. Apabila dikemudian hari terjadi sengketa, pemerintah Indonesia menetapkan prosedur penyelesaian sengketa secara khusus tercantum dalam Pasal 22 ayat 2 UUPMA yakni kompensasi. Jika terjadi sengketa mengenai jumlah, macam dan cara pembayaran kompensasi, maka akan diadakan *arbitrase* yang putusannya mengikat kedua belah pihak. Tindakan pemerintah demikian ini, menunjukkan adanya itikad baik dan kehendaknya untuk menghormati hak-hak pihak asing. Walaupun masih banyak pihak asing yang masih kurang percaya kepada kredibilitas hukum di Indonesia.

Untuk melindungi kepentingan pihak nasional menggunakan **metode Indonesianisasi** yang mengharuskan pihak asing untuk melibatkan pihak nasional dalam hal tenaga kerja, kemampuan dan modal, sebagai berikut :

(1) Partisipasi Tenaga Kerja

Agar dapat mengambil manfaat dari kehadiran modal asing di Indonesia dan untuk mencegah dominasi modal selama empat abad terakhir, pemerintah mewajibkan pihak asing untuk mempekerjakan sebanyak mungkin tenaga kerja nasional (Pasal 9, 10 dan 11 UUPMA).

Charles Himawan menyebut mekanisme kontrol semacam ini dengan *quantity participation*¹⁸ yakni suatu syarat untuk memaksimalkan partisipasi Indonesia dalam hal kuantitas.

Pelaksanaan kewajiban terhadap pihak asing untuk memakai sebanyak mungkin tenaga kerja pihak nasional Indonesia harus dipantau, jangan sampai pihak asing dibiarkan membawa tenaga kerja yang banyak dari negara asalnya dengan menyalahgunakan alasan kebanyakan tenaga kerja nasional Indonesia tidak cakap padahal bagi pihak asing berkewajiban untuk memberikan fasilitas-fasilitas latihan dan pendidikan bagi pihak nasional Indonesia sehingga yang dimaksudkan disini adalah keahlian yang dibawa dari luar negeri / pihak asing itu harus ditransfer ke pihak nasional Indonesia.

Penjelasan Pasal 12 UUPMA menyebutkan secara khusus macam pendidikan yang harus diberikan yakni di bidang teknik, pemasaran baik dalam negeri maupun luar negeri yang sering kita sebut “ *transfer of technology* “ yang disebabkan adanya kepercayaan pihak nasional terhadap pihak asing yang teknologinya lebih maju dan modern dalam peningkatan, penguasaan dan pengembangan teknologi.

¹⁸ Himawan, Charles, *The Foreign Investment Process In Indonesia*, Gunung Agung Press., Singapura, 1980, hal. 268.

(2) Partisipasi Kemampuan

Indonesia dalam meningkatkan ekonomi nasional dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam penguasaan peningkatan teknologi yang mendukung pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dengan adanya kemampuan menyerap teknologi yang dialihkan tersebut.

(3) Partisipasi Modal

Pemerintah menentukan agar para investor asing / pihak asing secara bertahap meningkatkan rasio andil modal Indonesia ke dalam perusahaan mereka (Pasal 27 UUPMA).

Charles Himawan menyebutkan mekanisme ini dengan istilah “ *equity participation*”¹⁹ (partisipasi modal) yang berusaha memaksimalkan keikutsertaan modal Indonesia pada perusahaan PMA.

Mekanisme “ *Indonesianisasi Saham*”²⁰ merupakan suatu hal yang logis bagi Indonesia yang memandang pentingnya modal asing dan teknologi asing untuk pembangunan ekonomi nasional, namun secara bersamaan berusaha untuk menghindarkan dominasi asing atas perekonomiannya.

¹⁹ Himawan, Charles, Op.cit., Hal.278

²⁰ Rajagukguk, Erman, *Indonesianisasi Saham*, Bina Aksara, Jakarta.,1985, hal.6

Modal bukanlah satu-satunya faktor penentu²¹ bahwa suatu perusahaan asing atau nasional, tetapi harus juga dipertimbangkan faktor teknis, manajerial, dan kebijaksanaan atau arah perusahaan.

Dengan demikian untuk mewujudkan penciptaan iklim usaha yang sehat yang ditandai oleh perusahaan asing dan nasional yang jujur dan bertanggungjawab menghasilkan pelaku usaha yang handal dan berdaya saing yang tinggi melalui upaya pemberdayaan konsumen, dalam memilih, menentukan dan menuntut haknya, bersamaan dengan upaya meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan kemandirian konsumen sekaligus meningkatkan harkat dan martabat konsumen.

Meskipun persaingan dalam penciptaan iklim usaha yang sehat bukan hanya menciptakan nilai untuk konsumen tetapi dapat juga menghilangkan lapangan kerja yang disebabkan perusahaan asing menawarkan produk yang lebih baik dengan harga yang lebih rendah dan menghentikan hubungan dengan pihak nasional atau bahkan sebaliknya.

²¹ Lubis, T. Mulya, *Hukum dan Ekonomi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hal.38

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan setelah diadakan analisis, maka dapatlah ditarik simpulan-simpulan sebagai berikut :

1. Kontrak alih teknologi merupakan sarana yang mendasari beralihnya suatu teknologi dari pihak pemberi / penghasil teknologi kepada pihak penerima / pembeli teknologi. Untuk terlaksananya alih teknologi yang diharapkan, akan berjalan dengan lancar dilandasi dengan tingkat rasa kepercayaan yang tinggi dan didukung oleh ; kualitas sumber daya manusia, ekonomi, hukum, teknologi, perbedaan norma dengan perusahaan asing, perbedaan kultur hukum terhadap alih teknologi dan politik. Dengan adanya pelaksanaan kontrak alih teknologi dan didorong oleh tingkat rasa kepercayaan yang tinggi serta adanya faktor pendukung dari pihak penerima / pembeli teknologi, maka kepentingan para pihak dapat dilindungi apabila terjadi sengketa dikemudian hari.
2. Pelaksanaan kontrak alih teknologi yang menyimpang akan berdampak terhadap para pihak yang telah bersepakat dan konsumen itu sendiri. Penyimpangan yang dilakukan akan dirasakan sekali oleh pihak penerima / pembeli teknologi dan konsumen yang memanfaatkan hasil teknologi tersebut.

Faktor yang mempengaruhi timbulnya kerugian bagi konsumen yakni : kualitas produk yang berubah, harga yang rendah dan bahaya akan kesehatan terhadap suatu produk teknologi, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpuasan dan hilangnya kepercayaan konsumen akan hasil suatu produk teknologi yang telah sesuai standar mutu pengujian produk.

3. Pembangunan kekuatan industri sebagai salah satu kunci untuk menentukan pembangunan nasional di bidang pertumbuhan dan perkembangan industrialisasi, harus dilakukan agar dapat membantu pembangunan ekonomi nasional. Peran serta dan keikutsertaan pemerintah untuk memperlancar sangat berpengaruh besar bagi berjalannya pelaksanaan alih teknologi untuk meningkatkan kualitas atau meraih keunggulan teknologi yang dihasilkan pihak nasional yang telah menerima alih teknologi dari pihak asing.
4. Peralihan teknologi dari pihak pemberi / penjual teknologi – pihak asing kepada pihak penerima / pembeli teknologi merupakan hubungan hukum yang terus berjalan dan mengikat para pihak, sehingga penerapan teknologi dapat dilaksanakan secara efektif dan menguntungkan para pihak yakni pihak asing, pihak nasional khususnya konsumen produk teknologi.

B. SARAN-SARAN

Sebagai upaya mendukung pelaksanaan kontrak alih teknologi antara perusahaan asing dan perusahaan nasional, akan diambil beberapa saran dari permasalahan diatas. Adapun saran-saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

1. Hendaknya manajemen kontrak alih teknologi dilaksanakan sebaik mungkin, dan sangatlah diperlukan adanya kesepakatan kehendak dalam mewujudkan suatu kontrak alih teknologi antara para pihak yakni pihak asing, pihak nasional khususnya konsumen produk teknologi.
2. Agar supaya penyimpangan terhadap kontrak alih teknologi tidak dirasakan sangat merugikan para pihak dan hendaknya penyimpangan tersebut sedapat mungkin dihindari kalau perlu diusahakan agar penyimpangan dapat diatasi seminim mungkin oleh para pihak.
3. Kepercayaan yang terjalin antara pemerintah, pihak asing dan pihak nasional harus terus dipertahankan dalam rangka perwujudan peralihan teknologi asing yang telah ditransfer terhadap pihak nasional yang didukung dengan kemampuan teknologi perusahaan melalui pemasaran atas suatu produk teknologi.
4. Diharapkan perlindungan hukum terhadap alih teknologi terus berjalan diantara para pihak yakni pihak yang menginvestasikan teknologinya – pihak asing dan pihak penerima teknologi – pihak nasional khususnya perlindungan hukum terhadap konsumen produk teknologi dalam penciptaan iklim usaha yang sehat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Anoraga, Panji, *Manajemen Bisnis*, Cetakan I, Rineka Cipta, Jakarta, 1997
- Amirizal, *Hukum Bisnis Risalah Teori Dan Praktek*, Djambatan, Jakarta, 1999
- Bagian Hukum Dan Masyarakat FH – UNDIP, *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial Dengan Orientasi Pada Penelitian Bidang Hukum*, Semarang. 1990
- Buku Perutangan, *Seksi Hukum Perdata*, Fakultas Hukum UGM, 1980
- Brata, Gunadi, Aloysius, *Modal Asing, Industri Dan Kemiskinan*, Atmajaya, Yogyakarta, 1999
- Baranson, Jack, *Technical Adjustment In Developing Economy : A Study In Transfer Technology Bay An International Corporation*, Indian University, Bloomington, 1965
- Bert, Rosenbloom, *Marketing Channels : A Manajemen View*, Hinsdale III, Dryden Press, 1987
- Boorstin, Daniel J, *The Republic Of Technology Reflection On Our Future Community*, Harper, & Row, New York, 1978
- Chandra, Gregorius, *Pemasaran Global*, Disunting Oleh Fandy, Tjiptono, Andi, Yogyakarta, 2001
- Dahlan, Bintang Sanusi, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi Dan Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Damsar, *Sosiologi Ekonomi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997
- Dimiyati, Khudzaifah, Kelik Wardiono, *Problema Globalisasi, Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi Dan Agama Muhammadiyah University Pres*, Surakarta, 2000
- Dror, Yehezkel, *Public Policy Making Reexmanined*, Sraton Pa : Candler Publishing Co., 1968
- , *Ventures In Policy Sciences Concept And Applications*, Elsevier, New York, Oxford Amsterdam, 1981

- Fuady, Munir, *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
- , *Hukum Kontrak Dipandang Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Ferrel Pride, *Marketing 7 Th Ed. (Pemasaran Teori Dan Praktek Sehari-Hari)*, Houghton Mifflin Company, 1995
- Frane Davidson J, *International Business And Global Technology*, Dc Heat And Company, Lexington, 1984
- Grant, James D *Teknologi : Penciptaan dan Pengalihannya*, Yayasan Obor Indonesia Dan PT. Gramedia, Jakarta, 1987
- Jones, Richard And Adam, John, *Franchising*, Butterworht, London, 1986
- Hartono, Sri Rejeki, *Kapita Selektu Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- Hartono, Sunaryati, *Cfg Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994
- Hamilton, *The Multinational : Spreadhead Or Spectre ?*, dalam CJ Dixon dkk (eds), *Multinational Corporation And The Third Word*, London ; Routledge
- Himawan, Charles, *The Foreing Investmen Process In Indonesia*, Gunung Agung Pres., Singapura, 1980
- Huberman, M.A., Miles B.M., *Analisis Data Kualitatif*, 1992
- Kuncoro, Mudrajat, *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah Dan Kebijakan*, Edisi Pertama, UPP AMP – YKPN, 1997
- Keraff, Sony, *Etika Bisnis*, Kanisius, Yogyakarta, 1998
- Khairandy, Ridwan, *Aspek-Aspek Hukum Teknologi Dan Alih Teknologi*, FH – UII, Yogyakarta, 1996
- Lubis T. Mulya, *Hukum Dan Ekonomi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987
- Macaulay, Stewart, *Non Contractual Relations In Business*, American Sociological Review, 1980

- Maulana, Budi, Insan, *Lisensi Paten*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Poloma, Margaret M, *Contemporary Sociological Theory*, terjemahan Yasogama, Raja Grafindo, Jakarta, 1994
- Padgorecki, Adam, Whelan Christoper J., *Approach Sosiological Of Law (Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum)* terjemahan Rnc. Widyaningsih Dan G. Kartasaputro, Bina Aksara, 1987
- Purbacaraka, Purnadi, Ali Chidir M., *Disiplin Hukum, Alumni*, Bandung, 1990
- Raharjdo Satjipto, *Pemanfaatan Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum, Alumni*, Bandung, 1977
- Rajagukguk, Erman, *Indonesianisasi Saham*, Bina Aksara, Jakarta, 1985
- Railon, Franscois, *Indonesia Tahun 2000 (Tantangan Teknologi Dan Industri) Terjemahan Nasir Tamara*, Cv. Haji Mas Agung, 1990
- Ritzer, George, *Sociology : A Multiple Paradigma Science*, terjemahan Alimanda, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994
- Robinson, Pearche, *Strategic Manajement*, Richard D. Irwin Inc., University Of South Carolina and George Mason University, 1997
- Robins, Stephen P, *Organitation Behaviour*, Prencite-Hall Inc., 1996
- Rosen Lawrence, *Law And Social Change In The New Nations*, Comparative Studies In Society And History, Jilid XX, 1978
- Satrio J., *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
- Siagian, Sondang P, *Etika Bisnis*, Pustaka Binaman Presindo, Jakarta 1996
- Simarmata A. Dj., *Pendekatan Sistem Dalam Analisa Proyek Investasi Dan Pasar Modal*, Gramedia, Jakarta, 1984
- Simmons, Luiz dan Said, Abdul A., *The Sovereigns Multinational Corporations As World Powers*, Prentice – Hall, 1975
- Sumardi, Juajir, *Aspek-Aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995

- Sumantoro, *Masalah Pengaturan Alih Teknologi*, Alumni, Bandung, 1985
- Shane, Robert S. Louis N, Mogavero, *What Every Engineer Should Know About Technology And Innovation*, New York, Marceel Dekker Inc., 1982
- Soemitro, Ronny, Hanintyo, *Studi Hukum Dan Masyarakat*, Alumni, Bandung 1985
-, *Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, Agung Press., 1989
- Soekanto, Soerjono, Sri Pamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995
- Wie, The Kian, *Industrial Di Indonesia, Beberapa Kajian Pengantar Mari Pangestu*, Pustaka LP3ES, 1994
- Wahab, Abdul Solichin, *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990
- Zamroni, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1992

Jurnal / Makalah :

- Achsany, Mansyur, Agus, *Problema Investasi Asing, Alih Teknologi Dan Kualitas Sumber Daya Manusia*, Media Ekonomi Volume 1 No. 1 Jakarta, 1996
- Alun, Tawang, *Pengembangan Teknologi Sebagai Satu Perangkat Kebijakan Pembangunan Nasional*, Prisma No. 4 Tahun XVI, April, 1987
- Agustina, Vina S, *Ekonomi Berbasis Teknologi Tinggi Sebagai Dimensi Ketiga PJPT*, Cetakan Kedua, Sintesis, Tahun 4, Juli – Agustus, Jakarta, 1999
- Christanto, Wibisono, *Peranan Swasta Dalam Proses Alih Teknologi*, Economica No. 15, Volume VII, FE-UI, Jakarta, 1985
- Dwi, Haryanto Ws, *Potensi Arus Teknologi Dalam Membentuk Mentalitas Masyarakat*, Sintesis, No. 16 Tahun 4, Juli – Agustus, Jakarta, 1996
- Daud, Silalahi, *Rencana UU Alih Teknologi : Perbandingan Perspektif*, Prisma No. 4 Tahun XVI, April, 1987

- Dikdik, Tandika, *Tinjauan Investasi Langsung Di Cina Sebagai Upaya Meningkatkan Investasi Di Indonesia* P2 FE-Unisba, Volume 1, Agustus, Bandung, 1999
- Djauhari, *Alih Teknologi Dalam PMA Sebagai Upaya Menopang Pembangunan Nasional*, Majalah Hukum Unissula, Semarang, 1994
- Dimyati, Hartono, *Hukum Dan Alih Teknologi*, Majalah Hukum Unissula, Semarang 1998
- Elman, Eddy, Patra, *Permasalahan Hukum Dalam Proses Alih Teknologi Kaitannya Dengan UUPMA*, Justica, Jurnal Penelitian Hukum No. 21 Tahun Vii, September-Desember, 1999
- Ibrahim, Anwar M, *Sekilas Perkembangan Alih Teknologi Di Indonesia*, Prisma No. 4 Tahun XVI, April 1987
- Ismid, Hadad, *Teknologi Untuk Melayani Siapa ?*, Prisma No. 4 Tahun XVI, April 1987
- Ita, Gambiro, *Hak Milik Industri Dan Alih Teknologi*, Prisma No. 4 Tahun XVI, April 1987
- Jusmaliani, *Japan's Role In Technology Transfer In Indonesia*, Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan, Volume 1 Edisi 1, 1993
- Juoro, Umar, *Mempercepat Proses Pembudayaan Teknologi*, Economica No. 15, Volume VII, FE-UI, Jakarta, 1985
- Machmud MZ, *Mengatasi Perilaku Perusahaan Transnational Di Negara-Negara Yang Sedang Berkembang*, Yuridika No. 5 Tahun III, November, 1988
- Mohammad Soelhi, Sena Haswati, *Produk Teknologi Bernilai Tambah Tinggi Sebagai Orientasi Ekonomi Masa Depan*, Sintesis No. 4, Juli-Agustus, 1999
- Mulya, Lubis T, *Alih Teknologi : Antara Harapan Dan Kenyataan*, Prisma No. 4 Tahun XVI, April, 1987
- Munadjad, Danusaputro, *Regulasi Dan Alih Teknologi Dalam Rangka Hukum Dan Pembangunan*, Temu Ilmiah Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1988
- Peornomosidi, Hadjisaroso, *Mengapa Tiap Bangsa Memerlukan Teknologi Tetapi Belum Semua Mampu Melahirkannya*, Economica No. 15, Volume VII, FE – UI, Jakarta, 1985

- Rene, Johanes, *Guidelines For Studt of The Transfer of Technology Tetapi Belum Semua Mampu Melahirkannya*, Economica No. 15, Volume VII, FE-UI, Jakarta, 1985
- Sahuri, *Penggunaan Hukum Dalam Proses Alih Teknologi Dalam Kaitannya Dengan UUPMA*, Majalah Forum Akademika, FH-Jambi, 1994
- Sigito, Sentot Prihandajani, *Pendayagunaan HAKI atas Hasil Penelitian dan Temuan Teknologi Bagi Kalangan Perguruan Tinggi di Indonesia*, Makalah Forum Diskusi Panel HAKI dalam Rangka Dies Natalis XXXVI, UNIBRAW, 1998
- Sumantoro, *Pengantar Mengenai Hukum Ekonomi dan Masalah Alih Teknologi*, Makalah FH-UNDIP, Semarang, 1994
- Soemitro, Ronny Hanintyo, *Masalah Alih Teknologi dan Hak Milik Intelektual*, Masalah-Masalah Hukum No. 1/1987, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1987
- Umar Juoro, *Mempercepat Proses Pembudayaan Teknologi*, Economica No. 15, Volume VII, FE-UI, Jakarta, 1985
- Valerie S. Folkes, Susan Kolestsky, John Graham, *A field Of Acausal Inferences and Consumer Reaction : The View From The Airport*, Journal Of Consumer Research 13, 1987
- Vernon R., *International Investment and International Trade IN Product Cycle*, The Quartely Journal Of Economic, 1980
- Wiyono, Vincent H., *Teknologi : Sumber Kemakmuran*, Jurnal FE-UNS, perspektif No. 13 Edisi I, Januari-Desember, 1999